

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Bidang Ilmu : Ekonomi

LAPORAN HASIL PENELITIAN PROFESOR



MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL	15 April 2014
SUMBER/HARGA	Hd
KOLEKSI	Fi
NO. INVENTARIS	699/Hd/2014 - a, (1)
KLASIFIKASI	

ANALISIS KEMISKINAN DI PROPINSI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Oleh:

Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, MS

Dibiayai dengan Dana DIPA APBN-P Universitas Negeri Padang
Sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Profesor
Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012
Nomor 737/UN35.2/PG/2012 Tanggal 3 Desember 2012


FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN PROFESOR**

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Judul Penelitian : | : Analisis Kemiskinan di Sumatera Barat
Dalam Perspektif Ekonomi |
| 2 | Bidang Ilmu | : Ilmu Ekonomi |
| 3 | Ketua Peneliti | |
| | a. Nama Lengkap | Prof. Dr. Syamsul Amar B, MS |
| | b. Jenis Kelamin | Laki-laki |
| | c. NIP | 19571021 198603 1 001 |
| | d. Disiplin ilmu | Ilmu Ekonomi |
| | e. Pangkat/Golongan | Pembina Utama/ IVe |
| | f. Jabatan | : Guru Besar |
| | g. Fakultas/Jurusan | Ekonomi / Ekonomi Pembangunan |
| | h. Alamat | Kampus UNP Jl. Prof. Hamka Air Tawar |
| | i. Telpon/Faks/E-mail | (0751) 445089/ (0751) 447366 |
| | j. Alamat Rumah | Jl. Perumahan Linggar Jati |
| | k. Telpon/Faks/E-mail | 0816351630 |
| 4 | Lokasi Penelitian | Propinsi Sumatera Barat |
| 5 | Waktu Penelitian | Oktober s.d. Desember 2012 |
| 6 | Jumlah biaya penelitian | Rp. 25.000.000 |
| | | Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah |


Mengetahui/Menyetujui
Dekan FE UNP
Prof. Dr. Yulia Wardi., Drs., M.Si
NIP. 19591109 198403 1 002

Padang, 29 Desember 2012
Ketua Peneliti,


Prof. Dr. Syamsul Amar B, MS
NIP. 19571021 198603 1 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Afwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002

ABSTRAK

Perkembangan historis kemiskinan di Indonesia memiliki kecenderungan penurunan secara terus menerus. Namun demikian, penanggulangan kemiskinan masih merupakan tantangan mendesak bagi Indonesia. Di antara ciri kemiskinan Indonesia adalah tingginya disparitas tingkat kemiskinan antar wilayah. Sumatera Barat meskipun memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata nasional, namun memiliki disparitas tingkat kemiskinan antar kota/kabupaten yang juga tinggi. Penelitian ini mendasarkan pada permasalahan kemiskinan sebagai permasalahan multidimensi. Untuk itu, analisis kemiskinan dilakukan untuk melihat variabel lokasi, beban ketergantungan, gender kepala rumahtangga, pekerjaan utama kepala rumahtangga, tingkat pendidikan kepala rumahtangga, kondisi kesehatan kepala rumahtangga, dan ketersediaan fasilitas listrik terhadap probabilitas suatu rumahtangga tergolong miskin atau tidak miskin.

Model yang digunakan pada penelitian adalah regresi logistik biner berganda. Penelitian ini menggunakan sampel dan data Susenas Kor 2009 yang meliputi 11.070 rumahtangga sampel. Hasilnya diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat sebesar 4,37 persen. Estimasi dengan menggunakan regresi logistik ditemukan variabel bebas secara bersama-sama memiliki hubungan dengan kondisi kesejahteraan atau kemiskinan rumahtangga sehingga model yang digunakan layak dan cocok.

Hasil pengujian signifikansi terhadap 7 variabel bebas yang digunakan, ditemukan bahwa 5 variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada derajat kepercayaan 99 persen. Lima variabel yang signifikan tersebut yaitu lokasi geografis, beban ketergantungan, pekerjaan utama kepala rumahtangga pada pertanian, dan pendidikan kepala rumahtangga. Sementara itu, dua variabel bebas lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel tersebut yaitu gender kepala rumahtangga dan ada tidaknya keluhan kesakitan. Nilai rasio odds untuk variabel lokasi yaitu sebesar 1,9 mengungkapkan bahwa rumahtangga yang berlokasi di daerah pesisir memiliki peluang 1,9 kali lebih besar tergolong sebagai rumahtangga miskin dibandingkan rumahtangga yang berlokasi di daerah bukan pesisir. Variabel beban ketergantungan yang memiliki odds rasio 1,04 dan tanda koefisien yang positif yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam rasio ketergantungan, maka peluang rumahtangga semakin meningkat sebesar 1,04 kali untuk menjadi rumahtangga miskin. Gender kepala rumahtangga, diperoleh nilai odds rasio sebesar 1,02 yang dapat diartikan bahwa rumahtangga yang dikepalai perempuan memiliki peluang 1,02 lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan kepala rumahtangga adalah laki-laki. Namun variabel gender ini tidak signifikan. Dalam mata pencaharian utama kepala rumahtangga di bidang pertanian diperoleh koefisien bernilai negatif dengan nilai rasio odds kurang dari satu mengungkapkan bahwa rumahtangga dengan kepala rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian menurunkan kecenderungan 0,64 kali menjadi rumahtangga miskin dibandingkan kepala rumahtangga yang bekerja di bidang non-pertanian atau kepala rumahtangga bekerja pada lapangan usaha non-pertanian memiliki peluang 1,5 kali lebih besar untuk menjadi rumahtangga miskin dibandingkan kepala rumahtangga pertanian.

Variabel listrik memiliki rasio odds yang positif sebesar 2,36 yang bermakna bahwa rumahtangga yang sumber penerangannya non listrik memiliki peluang atau kecenderungan sebesar 2,3 kali lebih besar untuk menjadi rumah tangga miskin dibandingkan rumah tangga yang sumber penerangannya dari listrik. Variabel bebas terakhir yaitu keluhan kesehatan dengan rasio odds 1,08 yang mengungkapkan bahwa kepala rumahtangga yang mengalami keluhan kesehatan meningkatkan peluang sebesar 1,08 kali untuk diklasifikasikan sebagai rumahtangga miskin dibandingkan kepala rumahtangga yang tidak mengalami keluhan kesehatan. Namun variabel ini tidak berpengaruh signifikan dalam menjelaskan kecenderungan kemiskinan rumahtangga.

Hasil penelitian mengimplikasikan sejumlah kebijakan penanggulangan kemiskinan diantaranya perlu mempertimbangkan kemiskinan pada rumahtangga pesisir melalui program pemberdayaan dan penataan kelembagaan nelayan. Implikasi berikutnya adalah revitalisasi program keluarga berencana secara terpadu dengan program ekonomi dan layanan pendidikan maupun kesehatan bagi rumahtangga miskin. Kemiskinan yang dialami rumahtangga perempuan dapat diatasi dengan memperkuat kelembagaan sistem sosial dan meningkatkan aksesibilitas ekonomi dan sosial bagi kaum perempuan. Pekerjaan kepala rumahtangga menunjukkan perlunya memperhatikan dan mengelola sektor informal di perkotaan dan pedesaan. Perhatian terhadap pendidikan bagi anak dan kepala rumahtangga miskin dapat dilakukan dengan pemberantasan buta huruf bagi penduduk dewasa dan meningkatkan layanan pendidikan bagi rumahtangga miskin melalui bantuan tunai bersyarat. Pemerintah perlu pula mendorong elektrifikasi untuk semua rumahtangga dengan lebih memperhatikan rumahtangga miskin dan di daerah terpencil melalui pencarian sumber energi alternatif yang sesuai sumberdaya di daerah-daerah terpencil seperti pembangkit listrik mikrohidro atau tenaga surya.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Petani Dalam Perspektif Ekonomi di Sumatera Barat*, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Profesor Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor: 737/UN35.2/PG/2012 Tanggal 3 Desember 2012.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2012

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
 BAB II PERUMUSAN MASALAH	10
 BAB III TUJUAN, LUARAN, DAN KONTRIBUSI PENELITIAN ..	15
3.1. Tujuan Penelitian	15
3.2. Luaran Penelitian	15
3.3. Kontribusi Penelitian	16
 BAB IV TINJAUAN PUSTAKA	17
4.1. Definisi Kemiskinan	17
4.2. Pengukuran Kemiskinan	20
4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	24
4.4. Penelitian Terdahulu	35
 BAB V METODE PENELITIAN	44
5.1. Populasi	44
5.2. Jenis dan Sumber Data	44
5.3. Sampel	44
5.4. Definisi Operasional	45
5.5. Teknik Analisis	46

BAB VI	HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	53
	5.1. Hasil Penelitian	53
	5.2. Pembahasan	82
BAB VII	SIMPULAN DAN SARAN	101
	7.1. Simpulan	101
	7.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1990-2010	3
Tabel 1.3. : Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2008 – 2010	7
Tabel 6.1 : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009	56
Tabel 6.2. : Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010	59
Tabel 6.3. : Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009 dan 2010	61
Tabel 6.4. : Jumlah Rumahtangga Sampel dan Kategori Kesejahteraan Rumah-tangga Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009	62
Tabel 6.5. : Lokasi Geografis Rumahtangga Menurut Kondisi Kesejahteraan Sumatera Barat 2009	64
Tabel 6.6. : Beban Ketergantungan dan Ukuran Demografis Rumahtangga Menurut Kondisi Kesejahteraan di Sumatera Barat Tahun 2009 ...	65
Tabel 6.7. : Kondisi Kesejahteraan Menurut Gender Kepala Keluarga di Sumatera Barat Tahun 2009	67
Tabel 6.8. : Pekerjaan Utama pada Pertanian Menurut Kondisi Kesejahteraan Sumatera Barat Tahun 2009	68
Tabel 6.9. : Tingkat Pendidikan Kepala Rumhtangga Menurut Kondisi Kesejahteraan Rumahtangga Di Sumatera Barat 2009	71
Tabel 6.10. : Kondisi Keluhan Kesehatan Kepala Rumahtangga Menurut Kondisi Kesejahteraan Sumatera Barat 2009	73
Tabel 6.11. : Ketersediaan Fasilitas Listrik Menurut Kondisi Kesejahteraan Rumahtangga Sumatera Barat Tahun 2009	74

Tabel 6.12.	: Penilaian Kelayakan Model dengan Uji Omnibus	75
Tabel 6.13	: Tabel Hasil Uji Kebaikan Model	76
Tabel 6.14	: Hasil pengolahan Uji Kebaikan Model dengan Uji Hosmer dan Lemeshow	77
Tabel 6.15.	: Hasil Pengujian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sumatera Barat tahun 2009	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia 1976-2006 2
Gambar 1.2.	Skema Agenda Penanggulangan Kemiskinan dalam Rencana dan Target Pembangunan 4
Gambar 1.3	Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010 6
Gambar 4.1.	Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Permintaan 26
Gambar 4.2.	Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat Keterbelakangan Sumberdaya 26
Gambar 4.3	Beberapa Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pedesaan 28
Gambar 6.1.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dibandingkan Propinsi-propinsi dan Nasional Tahun 2010 ... 58

BAB I

PENDAHULUAN

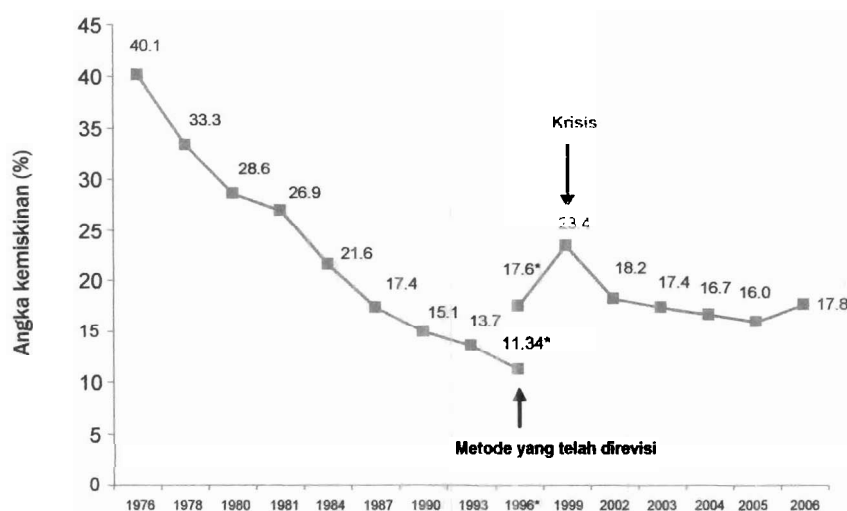
Persoalan kemiskinan yang masih besar dan kian kompleks menjadi tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang serius karena konsekuensi yang ditimbulkannya. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan juga mengakibatkan jutaan anak-anak tidak bisa memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan rakyat untuk membiayai layanan kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, serta menguatnya arus migrasi ke kota.

Perkembangan historis kemiskinan di Indonesia sebagai hasil proses pembangunan memiliki kecenderungan penurunan secara terus menerus. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tak pernah surut. Tingkat kemiskinan Indonesia telah menurun tajam dari 40,1 persen pada 1976 menjadi 11,34 persen pada 1996. Namun krisis ekonomi 1998 kembali menyebabkan meningkatnya kembali tingkat kemiskinan.

Pasca krisis dan dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Bank Dunia (2008), tengah berada di ambang era baru dan tahap penting dalam sejarah pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Indonesia telah pulih dari krisis ekonomi 1998 yang mengakibatkan jutaan penduduk masuk ke dalam jurang kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai negara

berpenghasilan rendah. Indonesia telah mampu melewati ambang batas kemiskinan. Angka kemiskinan yang meningkat lebih dari sepertiga kali selama krisis, kembali turun mencapai tingkat sebelum masa krisis. Indonesia pun kembali menjadi salah satu negara berpenghasilan menengah di dunia. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat diamati pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia 1976-2006



Sumber : Bank Dunia (2007; xxi).

Penanggulangan kemiskinan tetap merupakan salah satu tantangan mendesak bagi Indonesia. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir, sepanjang 2006-2011, terus berlanjut. Namun demikian jumlah dan persentasenya masih relatif tinggi. Hingga tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta atau 13,33 persen. Perkembangan jumlah dan tingkat kemiskinan selama dua dekade terakhir disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 1990-2010

Year	Number of the Poor (Millions of People)			Percentage of the Poor (%)		
	Urban	Rural	Total	Urban	Rural	National
1990	9,40	17,80	27,20	16,80	14,30	15,10
1993	8,70	17,20	25,90	13,50	13,80	13,70
1996	9,60	24,90	34,50	13,70	19,90	17,70
1998	17,60	31,90	49,50	21,90	25,70	24,20
1999	15,60	32,30	47,90	19,40	26,00	23,40
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,30	19,10
2001	8,60	29,30	37,90	9,80	24,80	18,40
2002	13,30	25,10	38,40	14,50	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,60	20,20	17,40
2004	11,50	24,60	36,10	12,60	19,50	16,60
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33

Sumber : BPS dalam Bappenas (2011)

Pemerintah Indonesia semakin menguatkan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan di masa mendatang. Komitmen kuat ini tercemin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM 2009-2014. Hal ini merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komitmen ini diperkuat oleh kesepakatan global. Indonesia ikut dalam menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau *Millennium Development Goals*). Konsekuensinya, Indonesia berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan separuhnya antara tahun 1990 hingga 2015.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah telah menjabarkan target-target utama penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2009 dan 2014. Hal ini meliputi target-target ambisius namun relevan, seperti mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Tantangan penanggulangan kemiskinan terlihat pula dari posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, namun jumlah penduduk yang hidup

dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS per hari sama dengan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan Asia Tenggara, misalnya Vietnam. Internalisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan, baik dalam RPJM maupun RKP beserta capaian dan targetnya sejak 2005-2014 disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Skema Agenda Penanggulangan Kemiskinan dalam Rencana dan Target Pembangunan

AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
RKP 2010 → Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat RKP 2011 → Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah					
INDIKATOR	Realisasi 2005	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009
Pertumbuhan Ekonomi :	5,7%	5,5 %	6,3%	6,1%	4,5%
Pengangguran:	11,24%	10,28%	9,11%	8,39%	7,87%
Kemiskinan:	15,97%	17,75 %	16,58%	15,42%	14,15%

Indikator	2010		2011	2012	2013	2014
	Rencana	Realisasi				
Pertumbuhan Ekonomi:	5.8 %	5.1 %	6.4%	6.4%-6.9%	6.7%-7.4%	7.0%-7.7%
Pengangguran	7.6%	7.14 %	7%	6.7%-7.0%	6.0%-6.6%	5.0%-6.0%
Kemiskinan	12.0%-13.5%	13.3 %	11.5%-12.5%	10.5%-11.5%	9.5%-10.5%	8%-10%

Sumber : Bappenas, 2011.

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu memperhatikan dimensi-dimensi khas kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia (2007; 28-46) mencatat tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong ‘miskin

dari segi pendapatan' dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

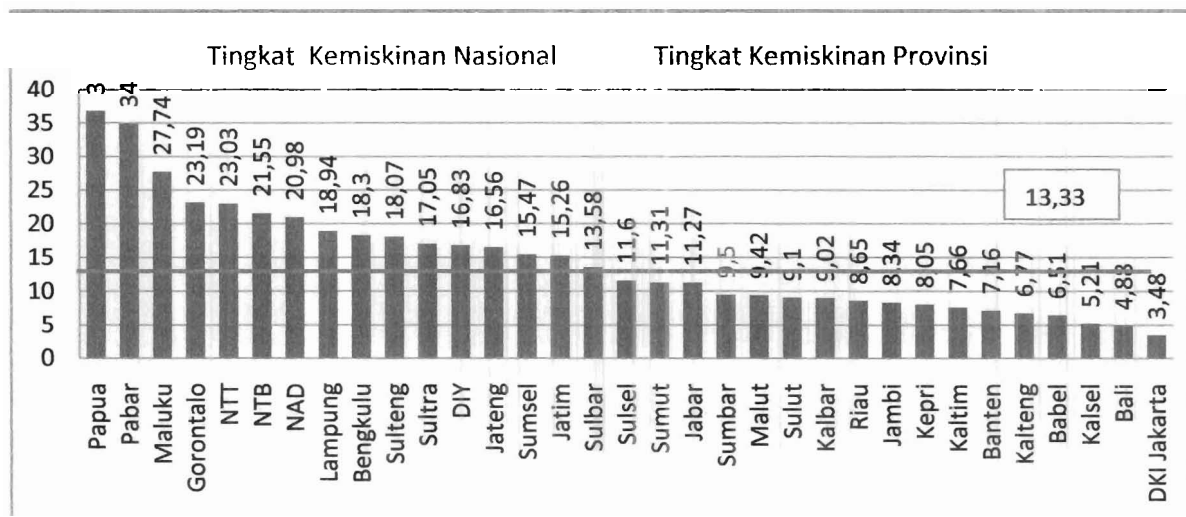
Berdasarkan ciri kedua, kemiskinan non-pendapatan menjadi masalah yang lebih serius bagi Indonesia daripada kemiskinan pendapatan. Kemiskinan non-pendapatan yaitu penduduk yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa gizi dan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang telah mencapai beberapa kemajuan di bidang pembangunan manusia dengan meningkatnya pencapaian angka partisipasi pendidikan dasar dan perbaikan cakupan layanan kesehatan dasar.

Sejumlah kemajuan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan pula. Aspek kemiskinan non-pendapatan lainnya masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kemiskinan kesehatan ditunjukkan oleh tingginya angka kesakitan (morbiditas). Pada bidang pendidikan, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah, terutama dari SLTP ke SLTA masih rendah, terutama diantara penduduk miskin. Pada penyediaan infrastruktur, akses terhadap listrik dan air bersih masih merupakan masalah serius.

Ciri ketiga dari kemiskinan di Indonesia yaitu tingginya perbedaan kemiskinan antar wilayah dan daerah. Ciri ini semakin penting dalam konteks Indonesia yang terdesentralisasi. Dimensi kemiskinan di Indonesia memperlihatkan pentingnya aspek kewilayahan dan kondisi lingkungan yang beragam, baik antar propinsi, antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, antara desa dan kota, maupun antara daerah pesisir, dataran dan pegunungan.

Disparitas kemiskinan Indonesia berdasarkan aspek kewilayahan terlihat dari tingkat kemiskinan antar propinsi. Berdasarkan data tahun 2010, mengacu kepada angka kemiskinan nasional sebesar 13,33 persen, tercatat 17 propinsi berada dibawah angka nasional, sedangkan 16 propinsi lainnya memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dari angka nasional. Disparitas ditunjukkan oleh lebarnya interval dari tingkat kemiskinan terendah di Propinsi DKI Jakarta sebesar 3,48 persen hingga tingkat kemiskinan tertinggi di Propinsi Papua sebesar 36,8 persen. Tingkat kemiskinan pada setiap propinsi tersaji pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010



Sumber : BPS Sumatera Barat, 2011

Dalam konteks Indonesia yang terdesentralisasi tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemampuan pemerintah dan masyarakat daerah menjadi penting. Sinergitas harus terbangun antara pemerintah pada berbagai tingkatan : pemerintah pusat, propinsi, dan kota/kabupaten maupun antara pemerintah, masyarakat dan sektor bisnis. Kompleksitas dan banyaknya ragam wajah

(multidimensi) kemiskinan mensyaratkan pula kebijakan yang komprehensif, multidimensional, lintas sektoral dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan keterpaduan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dari gambar 1.2. terlihat bahwa Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan dengan angka 9,3 persen. Angka yang lebih rendah daripada angka nasional. Namun sebagaimana ciri kemiskinan di Indonesia, disparitas tingkat kemiskinan antar daerah tergolong tinggi. Angka kemiskinan rata-rata tahun 2008-2010 berkisar dari yang terendah sebesar 2,28 persen di Kota Sawahlunto hingga yang tertinggi mencapai 21,06 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagaimana ditampilkan lebih lengkap pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2008 - 2010

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (%)			Rata-Rata
	2008	2009	2010	
Kab. Kepulauan Mentawai	22,86	20,54	19,77	21,06
Kab. Pesisir Selatan	11,36	10,56	10,22	10,71
Kab. Solok	13,43	12,15	11,74	12,44
Kab. Sijunjung	11,51	9,80	10,45	10,59
Kab. Tanah Datar	7,52	6,93	6,90	7,11
Kab. Padang Pariaman	14,15	12,41	11,86	12,81
Kab. Agam	11,20	9,86	9,85	10,30
Kab. Lima Puluh Kota	11,01	9,98	10,48	10,49
Kab. Pasaman	14,44	12,47	10,97	12,63
Kab. Solok Selatan	13,41	11,66	11,11	12,06
Kab. Dharmasraya	12,53	11,40	10,57	11,50
Kab. Pasaman Barat	10,96	9,61	9,59	10,05
Kota Padang	6,40	5,72	6,31	6,14
Kota Solok	7,32	6,76	7,00	7,03
Kota Sawahlunto	1,94	2,42	2,48	2,28
Kota Padang Panjang	8,24	7,58	7,59	7,80
Kota Bukittinggi	7,20	6,19	6,82	6,74
Kota Payakumbuh	10,96	10,15	10,58	10,56
Kota Pariaman	5,33	5,48	5,90	5,57
Rata-rata	10,62	9,56	9,48	9,89

Sumber : SUSENAS Sumatera Barat 2008- 2010

Berdasarkan karakteristik kemiskinan tersebut, menarik untuk menganalisis kemiskinan Sumatera Barat. Alasan untuk menganalisis kemiskinan di Sumatera Barat terutama tingkat kemiskinan di Sumatera Barat berada pada kategori menengah dibandingkan propinsi lain di Sumatera. Namun demikian, bila diamati sebaran per kabupaten/kota diperoleh hasil yang sangat timpang. Di samping itu, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat memiliki trend yang semakin menurun yaitu dari 12,51 persen pada tahun 2006 menjadi 9,50 pada tahun 2010. Namun demikian, tingkat kemiskinan ini masih tergolong tinggi dan penurunan tingkat kemiskinannya relatif lambat. Lambatnya penurunan kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kedalaman kemiskinan itu sendiri.

Kemiskinan bukanlah merupakan fenomena ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan fenomena sosial budaya yang cukup kompleks. Faktor sosial budaya ternyata sulit dipisahkan dengan masalah kemiskinan karena masih ada sistem nilai budaya yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat apalagi di pedesaan yang masih kuat tatanan sosial budayanya. Hambatan budaya tersebut akan turut memperburuk keadaan dan mempersulit masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan, jika hal tersebut dibiarkan akibatnya masyarakat akan tetap berada dalam kemiskinan, karena mereka telah dibentuk oleh sistem nilai budaya yang ada untuk menjadi miskin. Menurut Navis (1986:78) di Sumatera Barat terdapat dua sub sistem budaya yang dianut oleh masyarakat. Subsistem budaya tersebut adalah subsistem budaya Luhak Nan Tigo yang dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah darek (daratan) dan sub sistem nilai budaya rantau (daerah pesisir) yang dianut oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai lautan Indonesia. Sub sistem nilai budaya tersebut secara antropologis

akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat Sumatera Barat. Hal tersebut sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berbunyi *"Alam Takambang Manjadi Guru"* artinya manusia harus belajar dari alam dan lingkungan. Dengan demikian keadaan alam sekitar akan ikut menentukan sikap, perilaku dan persepsi masyarakat Minangkabau terhadap suatu objek tertentu termasuk juga di dalamnya mengenai masalah kemiskinan.

Atas dasar pemikiran tersebut, untuk itu menarik untuk dilakukan penelitian tentang jurang kemiskinan dan ketimpangan pendidikan yang dituangkan dalam proposal penelitian berjudul : *"Analisis Kemiskinan di Sumatera Barat dalam Perspektif Ekonomi"*.

BAB II

PERUMUSAN MASALAH

Kemiskinan itu sesungguhnya adalah suatu sindrome; suatu jalinan fenomena yang saling mengait. Orang miskin bukanlah suatu kelompok yang terisolasi dan berdiri sendiri, tetapi pada umumnya mereka terkait dalam satu hubungan kerja yang tidak jarang bersifat eksploitatif. Orang miskin adalah orang tidak berpunya; tidak saja tidak punya harta milik tetapi juga tidak punya pendidikan yang memadai, tidak mempunyai tingkat kesehatan yang baik, tidak mempunyai pengaruh atau kekuasaan. Sebagai akibat dari faktor tersebut orang miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan kurang akses dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam mempertahankan kehidupannya. Mereka kadang-kadang pasrah menerima keadaan dan sulit bagi mereka untuk keluar dari perangkap tersebut karena rendahnya sumberdaya yang mereka miliki (Hagul, 1986:5).

Salim (1984:42) mengemukakan orang tersebut miskin karena memang dia miskin dari segala aspek kehidupan. Dengan kemiskinan tersebut sangat terbatas aktivitas ekonomi yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki tingkat kehidupan mereka, karena rendahnya sumberdaya yang mereka miliki.

Kemiskinan dicirikan oleh faktor sumberdaya manusia dan potensi wilayah yang relatif rendah sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, aspek sosial budaya berupa gender dan beban ketergantungan yang tinggi, rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada, jenis pekerjaan. Batten (1989:207) mengemukakan, rendahnya sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat mengakibatkan mereka tidak responsif

dan tidak mampu akses dalam setiap gerakan pembangunan. Dengan demikian sedikit sekali peluang-peluang ekonomi yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kehidupannya.

Aspek wilayah, jenis pekerjaan, gender, aspek demografis, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan sangat menentukan bagi kegiatan ekonomi rumah tangga yang menentukan kondisi kesejahteraan atau kemiskinannya. Rumah tangga miskin cenderung berada pada sektor pertanian sebagai pekerjaan utama, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat ketergantungan jumlah anggota keluarga yang tinggi, sumber penerangan yang terbatas. Faktor-faktor ini sangat besar dalam menentukan pendapatan rumah tangga. Tentunya kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terbatas terutama kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan mewujudkannya. Dalam konteks ini, pendidikan adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan (*knowledge*). Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin menyebabkan kemampuan mereka untuk menghasilkan barang jasa juga semakin terbatas. Angka kesakitan akibat penyakit menular tampaknya sama dengan kelompok usia muda. Di sini menunjukkan bahwa apabila tingginya angka kesakitan pada penduduk terutama

golongan usia produktif dapat menurunkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dapat disebut juga pembangunan yang dilakukan sebagai investasi dari sumber daya manusia. Berdasarkan kenyataan bahwa Masyarakat miskin sangat terbatas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah yang seharusnya merupakan hak yang mendasar bagi manusia.

Hubungannya dengan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang memiliki kesehatan yang baik, fisik maupun mental dapat melakukan aktivitasnya secara produktif sehingga dapat mengabdikan diri untuk membangun negeri ini. Kesehatan berkaitan erat dengan sosio budaya masyarakat setempat.

Di samping itu, kemiskinan relatif terlihat dari pekerjaan jenis utama yang dilakukannya. Pekerjaan utama masyarakat miskin adalah sektor pertanian dengan tingkat produktivitas yang rendah sehingga pendapatan rendah. Laporan bulanan data sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2012 (2012: 45) menunjukkan penduduk Indonesia yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama masih didominasi sektor pertanian. Pada Februari 2012 lalu pekerja di sektor pertanian berjumlah 41,20 juta jiwa. bertani selama ini merupakan pekerjaan utama 40% penduduk Indonesia (42,82 juta), sedangkan jumlah penduduk miskin juga masih tinggi sekitar 31 juta jiwa dengan rincian 19% lebih di desa, dan 11% di kota.

Kepala rumah tangga turut menentukan tingkat kemiskinan. Kalangan penduduk miskin kebanyakan kepala keluarga dikepalai oleh wanita sehingga akses mereka mendapat pelayanan kesehatan semakin terbatas. Begitu juga halnya pada bidang pendidikan, tingkat putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga yang dikepalai oleh wanita adalah tinggi karena paksaan lingkungan bagi mereka untuk segera bekerja membantu untuk mencari nafkah keluarga semakin besar. Hal ini

berbeda dengan jika kepala keluarga dikepalai oleh pria, kondisi masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan jika kepala keluarganya adalah wanita. Penyebab dari wanita menjadi kepala keluarga adalah tingginya angka perceraian dan angka kematian pada pria.

Tingkat ketergantungan anggota keluarga yang tinggi menyebabkan dependensi rasio juga tinggi karena ini berkaitan dengan struktur usia yang ada di daerah dimana usia yang tidak produktif seperti usia dibawah 15 tahun kebawah jumlahnya banyak ditambah dengan jumlah usia diatas 64 tahun. Semakin tinggi tingkat ketergantungan anggota keluarga yang terjadi di masyarakat menggambarkan kondisi masyarakat yang miskin.

Listrik merupakan prasarana dasar yang diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. Persediaan listrik yang terbatas bagi masyarakat berdampak pada keterbelakang ekonomi dan pembangunan daerah. ketersediaan listrik ini merupakan infrastruktur dasar bagi masyarakat dan sebagai pengungkit peningkatan perekonomian, maka rasio elektrifikasi di daerah terpencil perlu mendapat prioritas khusus agar tidak semakin tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Pengembangan kelistrikan dapat diperhitungkan sebagai investasi yang dapat mendorong, memicu dan menstimulasi berbagai kegiatan ekonomi. Penyediaan listrik bagi masyarakat desa miskin dan tertinggal adalah pemanfaatan pembangkit energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan (*green energy*) melalui program percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan daerah tertinggal yang dikenal dengan program P2IPDT. Karena kendala letak geografis, desa-desa tertinggal dan terpencil ini umumnya berada di daerah-daerah miskin, sehingga akan sulit dijangkau oleh sistem jaringan transmisi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ke dalam bentuk yang lebih spesifik dan operasional sebagai berikut:

1. Sejauh manakah pengaruh lokasi geografis terhadap miskin atau tidak miskinnya rumahtangga di Propinsi Sumatera Barat?
2. Sejauh manakah pengaruh beban ketergantungan terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat?
3. Sejauh manakah pengaruh gender kepala rumah tangga terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat?
4. Sejauh manakah pengaruh jenis pekerjaan utama kepala rumahtangga terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat?
5. Sejauh manakah pengaruh tingkat pendidikan kepala rumahtangga terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat?
6. Sejauh manakah pengaruh kondisi kesehatan terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat?
7. Sejauhmanakah pengaruh ketersediaan listrik terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat?

BAB III

TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh lokasi geografis terhadap miskin atau tidak miskinnya rumahtangga di Propinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh beban ketergantungan terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh gender kepala rumah tangga terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat.
4. Pengaruh jenis pekerjaan utama kepala rumahtahgga terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat
5. Pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat.
6. Pengaruh kondisi kesehatan berpengaruh terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat.
7. Pengaruh ketersediaan sumber penerangan listrik terhadap miskin atau tidak miskinnya rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat.

3.2. Luaran Penelitian

Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, jurnal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional yang terakreditasi.

3.3. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan terutama pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat, Badan Perencana Pembangunan daerah dan Dinas Sosial kabupaten/kota dalam memecahkan masalah kemiskinan dan program pengentasan kemiskinan di daerah.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

4.1. Definisi Kemiskinan

Sejumlah definisi dan konsep tentang kemiskinan dikembangkan berbagai lembaga. Keragaman definisi kemiskinan memperlihatkan kemiskinan sebagai masalah yang bersifat multidimensi, sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar pada setiap aspek kehidupan. Kemiskinan dalam pandangan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, mengemukakan pandangan filosofis tentang kemiskinan. Ia menyatakan kemiskinan sebagai pencerabutan (*deprivasi*) dan ketiadaan pengakuan atas hak-hak masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai pendekatan kemiskinan berbasis hak dan pengakuan (*rights and entitlement*).

Sen dalam Todaro (2006:23) juga mengatakan bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*)” adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati. Kemiskinan seseorang terjadi karena tidak adanya kemampuan seseorang untuk mengambil manfaat dari barang-barang yang dikonsumsi. Hal ini terjadi karena hilangnya hak-hak dasar orang tersebut seperti tidak mendapatkan makanan bergizi, tidak berpendidikan, kurangnya kemampuan berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosialnya dan tidak memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. Hilangnya hak-hak



dasar tersebut mengakibatkan seseorang tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan mencapai kebahagiaan hidup.

Definisi kemiskinan yang diterima luas juga berasal dari pandangan Chambers (1987:145-147) yang mengungkapkan bahwa inti dari masalah kemiskinan yaitu terjadi “*deprivation trap*” atau jebakan kemiskinan. Jebakan kemiskinan terdiri dari lima unsur yang saling terkait, yaitu : (i) kemiskinan yaitu kondisi yang mengakibatkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, kekurangan gizi sehingga menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil; (ii) kelemahan jasmani yang mendorong seseorang ke arah kemiskinan melalui tingkat produktivitas tenaga yang rendah; (iii) isolasi karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil, buta huruf; (iv) kerentanan merupakan kemiskinan karena orang terpaksa menjual kekayaan akibat kejadian yang mendadak; (v) ketidakberdayaan yang mendorong proses kemiskinan dalam berbagai bentuk antara lain, orang yang tidak berdaya seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (2011:6-7) secara konseptual membedakan kemiskinan menjadi kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Adapun Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada penduduk termiskin.

Berdasarkan bentuknya, selain dua bentuk kemiskinan yang dikemukakan BPS tersebut, dikenal pula konsep kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural yaitu persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang menyebabkan miskin yang timbul dari sikap skeptis, kurang gigih untuk memperbaiki kualitas hidup karena menganggap kemiskinan mereka adalah bagian dari takdir, sikap malas, pemboros, tidak kreatif, dan sikap maupun perilaku kurang positif lainnya. Adapun kemiskinan struktural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh ketidakmampuan menjangkau atau rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan bahkan struktur sistem sosial budaya dan politik semakin mengekalkan maupun menyuburkan kemiskinan.

Keberadaan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan merupakan sebuah langkah maju pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan. SNPK mencerminkan perubahan paradigma pemerintah dalam memandang kemiskinan. Apabila sebelumnya kemiskinan dipandang secara parsial sebagai kondisi kekurangan (kekurangan pangan, kekurangan pendapatan, kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar), maka kini pandangan mengenai kemiskinan mulai lebih

komprehensif dan multidimensional. Setidaknya, perubahan paradigma tersebut tercantum dalam dokumen formal pemerintah tersebut.

Dalam SNPK, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang dikemukakan Amartya Sen yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

4.2. Pengukuran Kemiskinan

Upaya penting dalam pengentasan kemiskinan yaitu mengidentifikasi individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat miskin. Identifikasi kemiskinan ini sangat menentukan kepada efektifitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk tujuan itu telah berkembang berbagai upaya-upaya dalam melakukan pengukuran kemiskinan, baik pada konteks internasional maupun nasional.

Pertama, pada level internasional World mengembangkan beberapa pengukuran kemiskinan (2007:30) yaitu:

- a. Indeks Angka Kemiskinan (*poverty headcount index*, Po). Indeks ini adalah angka jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan. Indeks ini yang kadang-kadang disebut sebagai angka insiden kemiskinan (*poverty incidence*), adalah ukuran kemiskinan yang paling populer. Namun, ukuran ini tidak dapat membedakan diantara sub-kelompok penduduk miskin, dan juga tidak menunjukkan jangkauan tingkat kemiskinan. Ukuran ini tidak berubah meskipun seorang penduduk miskin menjadi lebih miskin atau menjadi lebih sejahtera, selama orang tersebut berada di bawah garis kemiskinan.
- b. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (*poverty gap index*, P1). Penurunan rata-rata konsumsi agregat terhadap garis kemiskinan untuk seluruh penduduk, dengan nilai nol (0) diberikan kepada mereka yang berada di atas garis kemiskinan. Kesenjangan kemiskinan dapat memberikan indikasi tentang berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui bantuan tunai yang ditujukan secara tepat kepada rakyat miskin. Indeks ini dapat menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan (*the depth of poverty*) dengan lebih baik, tetapi tidak menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan (*the severity of poverty*). Namun, angka tersebut tidak akan berubah, meski terjadi peralihan bantuan dari seorang penduduk miskin kepada penduduk lainnya yang lebih miskin.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index*, P2). Ukuran ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk yang sangat miskin dengan

menguadratkan jarak garis kemiskinan. Angka Ini dihitung dengan menguadratkan penurunan relatif konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan, dan kemudian nilai tersebut dirata-ratakan dengan seluruh penduduk, sambil memberikan nilai nol (0) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Ketika bantuan dialihkan dari orang miskin ke orang lain yang lebih miskin, hal ini akan menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan.

Kedua, UNDP mengembangkan pula ukuran Human Poverty Index (HPI) atau Indeks Kemiskinan Manusia sebagai kebalikan dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran kemiskinan yang diperkenalkan oleh UNDP adalah hilangnya tiga hal utama yaitu, kehidupan (lebih dari 30 persen penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung hidup kurang dari 40 tahun), pendidikan dasar (diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf) dan keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh persentase yang penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan).

Ketiga, ukuran kemiskinan yang relatif awal dan dikenal luas secara nasional adalah ukuran Sayogyo. Ia menentukan tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan rumahtangga : dengan pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun digolongkan sebagai rumahtangga miskin; bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun digolongkan Miskin Sekali; Sedangkan bila pengeluaran keluarga lebih kecil

daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun, maka tergolong keluarga paling miskin. Untuk daerah perkotaan, pengkategoriannya yaitu : (i) miskin apabila bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (ii) miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (iii) paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Namun, ukuran kemiskinan Sayogyo banyak mendapatkan kritikan karena memiliki kelemahan yaitu tidak mempertimbangkan tingkat biaya riil (Kuncoro, 1997:118).

Keempat, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Setiap tahunnya BPS menghitung tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.

Kelima, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra-KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk

melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m² per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan ((BPS, 2011:15-16)

4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

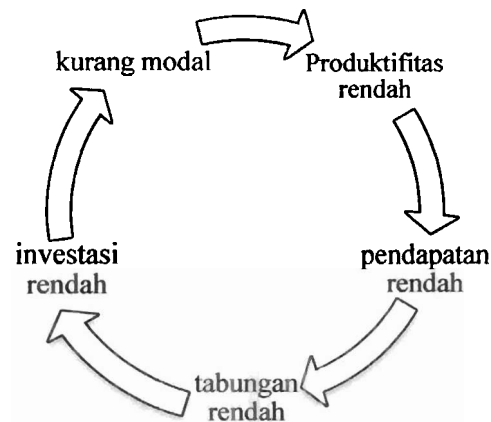
Luasnya dimensi kemiskinan berimplikasi pada kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Pemahaman terhadap definisi kemiskinan dapat memudahkan kita dalam memahami determinan kemiskinan. Berdasarkan pendekatan Sen (dalam Todaro, 2006:23) dapat dinyatakan bahwa kemiskinan disebabkan rendahnya kapabilitas keberfungsian yang dialami seseorang, rumah tangga atau masyarakat. kemiskinan terjadi disebabkan karena ketidakmampuan mengambil manfaat dari barang-barang yang dikonsumsi karena rendahnya pendidikan dan kesehatan, maupun oleh pemenuhan layanan kebutuhan dasar yang disediakan oleh pemerintah.

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan produktivitas yang rendah. Di sisi lain faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang

ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengait antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada di balik kemiskinan tersebut (Amar, 2000; 18)

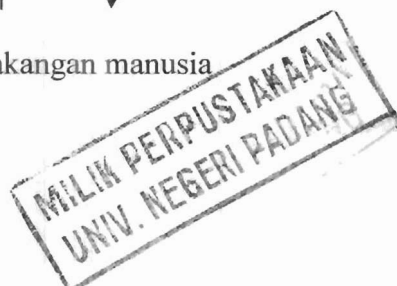
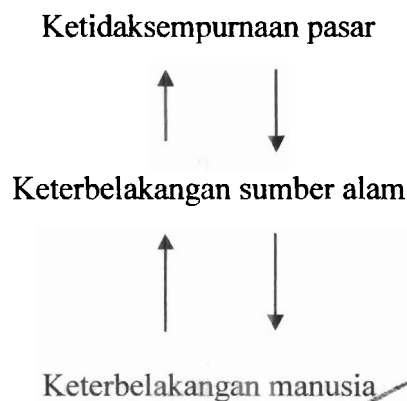
Nurkse mengungkapkan teorinya tentang kesulitan upaya-upaya pengentasan kemiskinan pada suatu negara dengan mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Nurkse selanjutnya mengajukan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) (Jhingan, 2007: 33-34). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. Lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari sisi permintaan diilustrasikan oleh gambar 4.1.

Gambar 4.1. Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Permintaan



Lingkaran setan kemiskinan juga berasal dari keterbelakangan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdayaan alam sehingga berkaitan pula dengan ketidaksempurnaan pasar. Pengembangan sumber alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan akitivitas kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna. Lingkaran setan kemiskinan dari sisi keterbelakangan sumberdaya ini disajikan pada gambar 4.2.

Gambar 4.2. Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat Keterbelakangan Sumberdaya

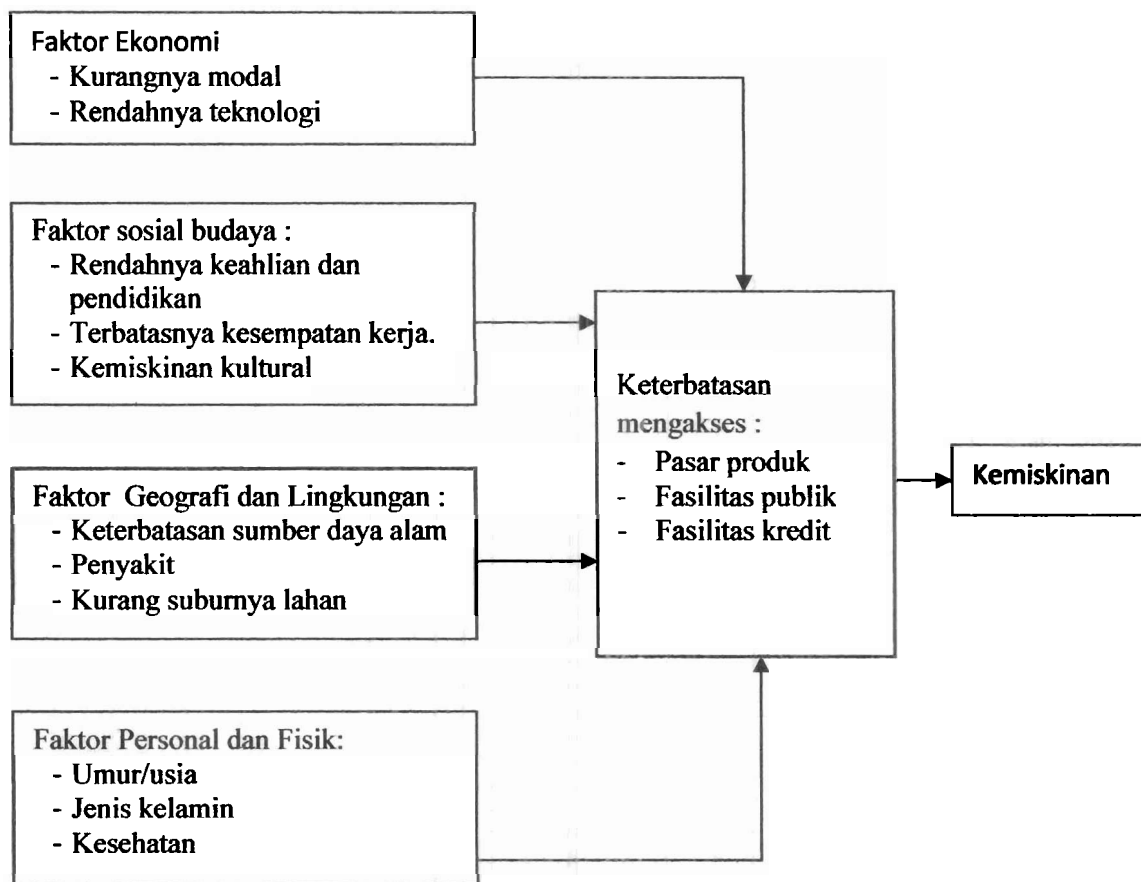


Sharp, et.al (1996) dalam Kuncoro (1997:120) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu :

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.

Untuk ruang lingkup yang lebih luas Both dan Firdausy (1994:81) dalam studi empirisnya menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat di pedesaan Asia. Faktor tersebut antara lain: (i) faktor ekonomi terdiri dari; modal, tanah dan teknologi; (ii) faktor sosial dan budaya terdiri dari; pendidikan, budaya miskin dan kesempatan kerja; (iii) faktor geografis dan lingkungan; (iv) faktor pribadi terdiri dari; jenis kelamin, kesehatan dan usia. Keempat faktor tersebut mempengaruhi tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pasar, fasilitas umum dan kredit. Lebih lanjut Both dan Firdausy menyatakan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap ketiga faktor tersebutlah yang mempengaruhi tingkat kemiskinannya. Kerangka pemikiran penelitian Both dan Firdausy disajikan oleh gambar 4.3.

**Gambar 4.3 : Beberapa Faktor Utama Yang Mempengaruhi
Kemiskinan Pedesaan**



Sumber Both, Anne and Firdausy (1996) Effect of Price and Market Reform on The Situation of Rural Communities and Firm Families. New York: Economic and Social Commision for Asia Pacific

Untuk konteks Asia dan Afrika, hasil penelitian Schubert (1994:32) menyimpulkan sejumlah karakteritik kemiskinan di beberapa negara di Asia dan di Afrika. Karakteristik tersebut yaitu: (i) kurangnya sarana dan prasarana; akibatnya penduduk miskin cenderung tinggal di daerah kotor (*shum areas*) dengan penduduknya yang cukup padat; (ii) besarnya ukuran keluarga. Hal ini merupakan refleksi dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola keluarga kecil. Besarnya ukuran keluarga mengakibatkan tingginya angka ketergantungan dan rendah pendapatan perkapita keluarga; (iii)

sempitnya lahan di samping itu, tidak dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik; (iv) rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan; (v) rendahnya mutu lingkungan hidup; (vi) memiliki sumber nafkah utama dari pertanian. Di sisi lain jumlah tenaga kerja *di* sektor ini cukup banyak akibatnya produktivitas marginal masing-masing tenaga kerja cenderung semakin lama semakin menurun; (vii) hampir semua pendapatan rumah tangga digunakan untuk tujuan konsumsi; (viii) rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan umum.

Lebih lanjut hasil penelitian Schuber (1994:33) di Amerika Latin memperlihatkan dua faktor dominan yang menentukan tingkat kemiskinan masyarakat, Faktor tersebut antara lain; rendahnya pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyat dan tingginya arus urbanisasi. Rendahnya pelayanan sosial terlihat dari kurangnya penyediaan fasilitas umum seperti pelayanan kesehatan, air bersih dan fasilitas kredit. Rendahnya pelayanan umum mengakibatkan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat. Sementara tingginya arus urbanisasi mengakibatkan meningkatkan jumlah pekerja yang bergerak di sektor informal dengan produktivitas yang rendah.

Karakteristik penting kemiskinan secara gender yaitu tingginya kemiskinan yang dialami kaum perempuan. Have dan Elizabeth (1994:290-295) melakukan penelitian di Papua New Guinea mengenai peranan perempuan terhadap program pengentasan kemiskinan. Hasil studi menyatakan: (i) alokasi waktu ibu rumah tangga yang cukup besar terhadap kegiatan produktif cenderung membuat rumah tangga tersebut terhindar dari belenggu kemiskinan; (ii) ibu rumah tangga yang akses terhadap informasi lebih kuat dalam menantang badai kemiskinan.

Kelompok ibu rumah tangga yang memiliki akses terhadap informasi memiliki kiat tersendiri dalam mengantisipasi kemiskinan. Ternyata kelompok tersebut juga memiliki akses terhadap pasar dan kegiatan-kegiatan produktif yang mampu menunjang pendapatan keluarga; (iii) ibu rumah tangga yang berpendidikan lebih rendah ternyata lebih rentan dengan kemiskinan dan sebaliknya; (iv) ibu rumah tangga yang memiliki aspirasi dan harapan terhadap masa depan cenderung terhindar dari belenggu kemiskinan.

Haughton dan Khandker (2009:145) merinci bahwa terdapat perbedaan akar penyebab kemiskinan pada setiap unit analisis kemiskinan. Unit analisis dan faktor penyebab kemiskinan yaitu : (i) karakteristik pada tingkat daerah meliputi kerentanan terhadap bencana banjir atau badai, keterpencilan, kualitas tata kelola pemerintahan, hak kepemilikan; (ii) karakteristik pada level komunitas atau masyarakat mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, dan listrik), layanan pendidikan dan kesehatan, kedekatan jarak ke pasar dan hubungan sosial; (iii) pada level rumah tangga maupun individu, faktor yang mempengaruhinya semakin kompleks, diantaranya yang sangat penting yaitu : demografis berupa ukuran rumah tangga, struktur umur, beban ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga; faktor ekonomi berupa status pekerjaan, jam kerja dan kepemilikan kekayaan; faktor sosial berupa status kesehatan dan gizi, pendidikan, dan perumahan.

Dalam studinya yang terbaru dan komprehensif tentang kemiskinan di Indonesia, Bank Dunia (2007:57-61) mengemukakan sejumlah factor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu : pertama, pendidikan. Pendidikan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pendidikan yang tidak memadai. Meningkatkan

capaian pendidikan yang lebih tinggi di wilayah tertentu berkaitan dengan pengurangan kemiskinan yang lebih besar.

Kedua, pekerjaan. Bekerja disektor pertanian memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan. Kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih rendah (dan karena itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin) dibandingkan mereka yang bekerja disektor lain.

Ketiga, gender. Penilaian terhadap risiko dan kerentanan diantara beberapa tipe rumah tangga dan tahap-tahap siklus hidup yang berbeda mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami guncangan-guncangan negatif akibat konflik, masalah kesehatan dan risiko ekonomi.

Keempat, akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar. Rumah tangga di daerah pedesaan yang memiliki lebih banyak akses kepada pendidikan sekolah menengah jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi miskin.

Kelima, Lokasi geografis. Dengan adanya ketimpangan antarwilayah, tidaklah mengherankan bila lokasi geografis juga berkorelasi dengan kemiskinan, karena lokasi geografis dapat menyebabkan terjadi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi akan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan suatu daerah.

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan

kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Schultz (1961, 1971) dan Becker (1975) dalam Danim (2004:36) menempatkan pendidikan sebagai tujuan dan alat bagi pencapaian kesejahteraan manusia. Pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk investasi yang mendatangkan keuntungan di masa depan. Manusia terdidik umumnya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan hal itu dapat mendorong pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, konsep modal manusia tidak hanya dapat diterapkan pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada aktivitas apa saja yang menambah kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan antara lain : sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja dan sektor pembangunan lainnya. Kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup meliputi (Mulyadi, 2003:4-5) :

- a. Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang, dalam arti responsif terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan mutu pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk miskin dan daerah terpencil.
- c. Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan.

- d. Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan.

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy (2004), kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (artificial). Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Adapun kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan pada level rumahtangga secara umum dipengaruhi oleh faktor demografis, ekonomi dan sosial. Analisis kemiskinan pada level rumahtangga semakin penting untuk mempertajam karakteristik dan pengaruh berbagai faktor yang berbeda pada setiap wilayah. Untuk itulah berbagai faktor yang dikemukakan oleh Haughton dan Khandker (2009) dan faktor yang menentukan kemiskinan di Indonesia sebagaimana digunakan oleh Bank Dunia (2007) memiliki alasan-alasan penting untuk menganalisis kemiskinan di Sumatera Barat pada level rumahtangga dengan menguji pengaruh faktor lokasi geografis, gender kepala rumahtangga, beban ketergantungan, pekerjaan kepala rumahtangga, tingkat pendidikan kepala rumahtangga, ketersediaan infrastruktur listrik dan kondisi kesehatan.

4.4. Penelitian Terdahulu

Studi tentang kemiskinan yang mengemuka sejak pasca Perang Dunia II terutama sejak tahun 1970-an. Studi yang intensif tentang problema kemiskinan telah memunculkan ilmu ekonomi pembangunan yang pada awalnya didefinisikan oleh Herrick dan Kindleberger (1985, dalam Prayitno dan Santosa, 1996; 37) sebagai ilmu yang mempelajari tentang kemiskinan, beserta faktor penyebab dan cara mengatasinya. Studi tentang kemiskinan tak pernah surut bahkan semakin intensif pada beberapa tahun terakhir.

Diantara banyak studi kemiskinan rumahtangga yang relevan dan relatif baru dengan penelitian ini yaitu :

- a. Bank Dunia (2007) melakukan studi tentang kemiskinan di Indonesia dengan variabel terikat adalah pengeluaran rumahtangga per kapita sebagai indikator

tingkat kemiskinan sebagaimana yang digunakan oleh BPS berdasarkan Susenas 2004. Variabel bebas yang digunakan meliputi 26 variabel yang terdiri dari 4 model yang diagregasi menjadi perkotaan dan pedesaan. Secara umum, variabel bebas terdiri dari karakteristik demografis kepala rumahtangga yang terdiri dari 5 sub variabel, pekerjaan kepala rumahtangga yang terdiri dari 6 sub variabel, pekerjaan yang bukan kepala rumahtangga dengan pendidikan tertinggi dengan 3 variabel, karakteristik rumahtangga lainnya dengan 3 sub variabel dan karakteristik masyarakat dan fasilitas daerah yang terdiri dari 6 variabel.

Ditemukan bahwa faktor-faktor signifikan mempengaruhi kemiskinan yang menentukan kemiskinan. Pada faktor pendidikan ditemukan bahwa kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan yang tidak memadai. Kepala rumahtangga yang menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar mampu meningkatkan kesejahteraan secara berarti. Peningkatan capaian jenjang pendidikan di wilayah/area tertentu berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan yang lebih besar.

Pada pekerjaan ditemukan bahwa bekerja di sektor pertanian memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan. Temuan yang didiskusikan oleh penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan terlihat sedikit lebih rendah pada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

Pengaruh ketersediaan sejumlah infrastruktur dasar terhadap kemiskinan ditemukan bahwa secara umum kemiskinan ditentukan oleh rendahnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar. Rumah tangga di daerah pedesaan yang memiliki lebih banyak akses kepada pendidikan

sekolah menengah jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi miskin. Akses kursus informal dapat menjadi faktor kunci dalam mobilitas ekonomi ke atas, khususnya di daerah perkotaan. Akses lembaga perkreditan setempat juga menaikkan secara berarti tingkat pengeluaran dan mengurangi kemungkinan rumah tangga untuk menjadi miskin. Untuk akses jalan memiliki korelasi dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Akses telekomunikasi memiliki kaitan yang tidak signifikan dengan konsumsi pada tingkat nasional, tetapi cukup signifikan pada sebagian wilayah.

Penelitian ini secara khusus juga menganalisis pengaruh lokasi geografis terhadap kemiskinan. Dengan adanya ketimpangan antarwilayah, tidaklah mengherankan bila lokasi geografis juga berkorelasi dengan kemiskinan. Aspek geografis dibagi menurut sejumlah pulau-pulau utama di Indonesia dengan karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

- b. Amar (2000) yang meneliti tentang analisis kemiskinan di pedesaan Sumatera Barat dengan menggunakan *multiple logistic regression* dalam disertasi doctoral di Universitas Airlangga. Pada penelitian ini, variabel terikat logistik biner yaitu miskin atau tidaknya rumah tangga, sedangkan variabel bebas meliputi luas lahan yang terdiri dari tiga sub variabel, teknologi, tingkat pendidikan yang terdiri dari empat sub variabel, tingkat kesehatan yang terdiri dari dua sub variabel, aksesibilitas terhadap kelembagaan yang terdiri dari empat sub variabel dan mata pencaharian alternatif dengan dua sub variabel.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi memiliki

pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga, sementara tingkat adopsi teknologi relatif masih rendah dan rata-rata penguasaan rumah tangga relatif sempit. Tingkat kesehatan sangat signifikan untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan, namun di sisi lain masyarakat desa masih sangat rentan dengan berbagai penyakit. Pencarian alternatif memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga, sementara kegiatan luar pertanian yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini masih terbatas kepada kegiatan dengan produktivitas rendah.

Dalam konteks penelitian penulis sebelumnya, maka penelitian ini merupakan update dengan sejumlah penyesuaian dalam hal unit analisisnya. Jika penelitian ini hanya rumah tangga pedesaan dengan sejumlah sampling, maka penelitian ini meliputi rumah tangga di seluruh kecamatan di Sumatera Barat dari sampel Susenas Kor 2009. Variabel yang digunakan juga relatif berbeda.

- c. Ghaiha (1985:35) melakukan penelitian kuantitatif yang dilakukan di India menggunakan Model Logistik dengan pendekatan *Ordinary Least Square*, Objek penelitian adalah rumah tangga dengan jumlah sampel sebanyak 2290 rumah tangga. Variabel penelitian terdiri dari: (1) lokasi; (2) teknologi; (3) demografi; (4) pendidikan. Variabel lokasi dikembangkan menjadi tiga sub variabel yaitu: (a) Jaringan transportasi ke desa; (b) fasilitas pelayanan kesehatan; (c) fasilitas pelayanan ekonomi. Variabel teknologi terdiri dari empat sub variabel yaitu: (a) penggunaan traktor; (b) penggunaan listrik; (c) penggunaan bibit unggul; (d) luas lahan 1 hektar; (d)

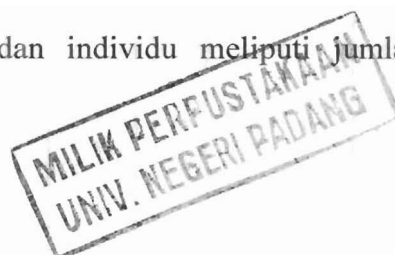
peniggunaan jasa pelayanan bimbingan dan penyuluh lapangan. Masing-masing sub variabel diukur dengan dummy yaitu nilai 1 jika ada (ya) dan skor 0 jika tidak ada.

Variabel demografik terdiri dari empat sub variabel yaitu: (a) jumlah anggota keluarga; (b) rasio ketergantungan; (c) usia kepala rumah tangga; (d) perbandingan pekerja laki-laki dengan pekerja wanita dalam rumah tangga. Variabel pendidikan diukur dengan dummy yaitu skor 1 bagi kepala rumah tangga yang berpendidikan enam tahun ke bawah dan skor 0 bagi kepala rumah tangga berpendidikan di atas enam tahun.

Hasil penelitian Ghaiha menyimpulkan secara bersama-sama seluruh sub variabel bebas menunjukkan pengaruh sangat signifikan terhadap probabilitas kemiskinan rumah tangga. Namun secara sendiri-sendiri ada empat sub variabel tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap probabilitas kemiskinan. Sub variabel tersebut antara lain: penggunaan traktor, penggunaan listrik dan perbandingan jumlah pekerja laki dengan pekerja wanita dalam rumah tangga.

- d. Usman et.al (2006) menganalisis determinan kemiskinan di Indonesia sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dengan menggunakan model logistic untuk menghitung peluang rumahtangga tergolong rumahtangga miskin atau tidak miskin. Variabel terikat yang digunakan mencapai 20 variabel. Variabel ini dibagi menjadi 3 tiga kelompok yaitu karakteristik rumah tangga dan individu, faktor komunitas, dan karakteristik wilayah.

Karakteristik rumahtangga dan individu meliputi jumlah tahun



bersekolah dari seluruh anggota keluarga, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, kepala keluarga bekerja, kepala rumah tangga adalah pekerja pertanian, kepala rumah tangga adalah buruh pertanian pangan, luas lantai perkapita, sumber air mata air terbuka, dan luas lahan pertanian.

Berikutnya faktor komunitas yang menggunakan sub variabel terdiri dari : ketersediaan, transportasi utama melalui darat, jalan dapat dilalui kendaraan bermotor, terdapat lembaga keuangan, terdapat industry, terdapat irigasi, dan terdapat Galian C. Adapun karakteristik wilayah dibagi menjadi pantai, dataran dan pesisir.

Penelitian menemukan bahwa variabel yang dapat menambah kemiskinan berturut-turut dari nilai *marginal effect* terbesar adalah jumlah anggota rumah tangga, kepala keluarga sebagai buruh tani, sumber air yang tidak terlindung, dan kepala keluarga bekerja di bidang pertanian. Adapun variabel yang dapat mengurangi kemiskinan adalah kepala rumah tangga yang bekerja, kepemilikan aset lahan pertanian, dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga.

Ditemukan pula bahwa faktor karakteristik rumah tangga dan individu, sumberdaya manusia merupakan variabel penting untuk memperoleh pekerjaan, dan sumber daya manusia berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Daerah yang memiliki transportasi utama darat dan dapat dilalui kendaraan bermotor serta terdapat industri dapat mengurangi peluang penduduknya menjadi miskin, namun di tahun 2002 justru dapat menambah peluang miskin. Hal ini membuktikan bahwa di tahun 2002 (setelah

desentralisasi fiskal) adanya penurunan kualitas infrastruktur jalan, yang akibatnya kemiskinan semakin bertambah. Faktor komunitas infrastruktur yang juga penting adalah akses listrik. Hasil analisis membuktikan bahwa baik di tahun 1999 maupun 2002 rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik akan menambah peluang menjadi miskin. Keadaan infrastruktur di Indonesia memang sudah saatnya untuk diperbaiki. Salah satu contoh lain adalah irigasi. Analisis studi ini membuktikan bahwa keberadaan irigasi baik di tahun 1999 maupun 2002 justru menambah kemiskinan, hal ini membuktikan adanya sistem irigasi yang tidak berjalan dengan baik.

Pada sisi karakteristik wilayah, daerah pegunungan ternyata memiliki resiko kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah pantai dan dataran. Sementara itu daerah pantai memiliki resiko kemiskinan paling rendah.

Secara keseluruhan, yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur.

- e. Anggraeni (2009) melakukan studi faktor determinan kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor. Sebagaimana studi kemiskinan lainnya, penelitian ini menggunakan regresi logistik biner. Variabel pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang dibagi menjadi karakteristik demografi, karakteristik ekonomi, dan karakteristik sosial.

Hasil penelitian menemukan bahwa pada karakteristik demografi, penduduk miskin yang anggota keluarganya lebih dari lima orang memiliki

resiko untuk miskin lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang memiliki anggota keluarga kurang dari lima orang. Hal ini berlaku baik untuk wilayah desa maupun kota. Ditemukan pula bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh wanita tidak terbukti memiliki resiko untuk lebih miskin jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga pria. Rumah tangga yang berada di wilayah perkotaan cenderung menjadi tidak miskin apabila terdapat cukup sarana kesehatan karena ketersediaan sarana memberikan alternatif bagi anggota rumah tangga untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Pendidikan ibu memegang peranan penting dalam membentuk keluarganya, dalam hal ini tingkat pendidikan ibu memberikan resiko menjadi tidak miskin suatu rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki rasio pengeluaran untuk makanan yang besar memiliki resiko untuk menjadi miskin.

Pada karakteristik ekonomi diperoleh temuan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja di sektor selain pertanian dan industri sangat mengurangi peluang untuk tidak miskin. Besaran upah yang diterima mengurangi kemungkinan rumah tangga menjadi miskin. Ketersediaan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit berpengaruh terhadap rumah tangga menjadi miskin.

Peranan karakteristik sosial diperoleh hasil bahwa karakteristik perumahan bercirikan rumah tangga miskin adalah sebagai berikut: luas lantai yang tidak memadai dan penggunaan jamban bersama. Karakteristik sumber air minum bersih dan sumber energi rumah tangga tidak terbukti merupakan ciri suatu rumah tangga miskin. Rumah tangga yang teraliri listrik adalah ciri rumah tangga tidak miskin namun hal ini hanya berlaku pada wilayah

perkotaan. Jalan yang diyakini akan membuka akses daerah terpencil dan miskin tidak terbukti merupakan ciri rumah tangga miskin. Hal ini mungkin saja terjadi karena jalan tidak memberikan manfaat peningkatan produktivitas rumah tangga miskin.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kajian kemiskinan pada level rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap wilayah. Faktor-faktor yang menentukan kemiskinan berbeda pula pada wilayah yang diteliti. Diantara perbedaan itu, penelitian terdahulu mengkaji kemiskinan rumah tangga meliputi karakteristik demografis dan geografis, karakteristik ekonomi dan karakteristik sosial. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini selanjutnya dijelaskan pada Bab V.



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Populasi

Unit analisis pada penelitian ini adalah rumahtangga yang tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan Susenas 2009, jumlah rumahtangga di Sumatera Barat sebanyak 1.086.792 unit (BPS Sumatera Barat, 2010). Rumahtangga yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan batasan BPS yaitu sekelompok komunitas yang memiliki sumber pendapatan bersama. Dengan demikian jumlah pendapatan rumahtangga dan anggota keluarga akan sangat menentukan miskin atau tidak miskinnya sebuah rumahtangga.

Penentuan miskin atau tidak miskinnya rumahtangga didasarkan atas ukuran garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sesuai dengan paritas daya beli pada setiap kabupaten atau kota dari rumahtangga.

5.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya merupakan data sekunder. Periode waktu penelitian ini menggunakan data *cross section* dengan unit analisis adalah rumahtangga yang meliputi 11.070 unit rumahtangga di Sumatera Barat pada tahun 2009.

Berdasarkan cara memperolehnya, sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2009. Sampel pada penelitian merupakan sampel Susenas 2009 yaitu rumahtangga di Sumatera Barat sebanyak 11.070 rumahtangga yang meliputi 45.865 jiwa.

5.3. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

- a. Kondisi kemiskinan rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu miskin dan tidak miskin. Penentuan tingkat kemiskinan mengacu pada garis kemiskinan versi BPS. Rumahtangga miskin yaitu rumahtangga yang memiliki pendapatan per kapita atau total pendapatan rumahtangga dibagi jumlah anggota keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sesuai kabupaten/kota tempat tinggal rumahtangga, sedangkan rumahtangga tidak miskin yaitu rumahtangga dengan pendapatan per kapita diatas garis kemiskinan di daerah bersangkutan. Dalam hal ini diukur dengan variabel dummy yaitu 1 untuk rumahtangga miskin dan 0 untuk lainnya atau rumahtangga tidak miskin.
- b. Lokasi geografis yaitu lokasi tempat tinggal rumahtangga yang diukur dengan menggunakan variabel dummy berupa 1 untuk rumahtangga yang berlokasi di daerah pesisir dan 0 untuk lainnya.
- c. Beban ketergantungan yaitu jumlah penduduk yang berusia dibawah 10 tahun terhadap jumlah anggota rumahtangga. Dinyatakan dalam satuan persen.
- d. Gender kepala rumahtangga yaitu jenis kelamin dari kepala rumahtangga dengan menggunakan variabel dummy yaitu 1 untuk perempuan dan 0 untuk lainnya.
- e. Pekerjaan utama adalah pekerjaan utama kepala rumahtangga yang dibedakan menjadi agraris dan non-agraris. Diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu 1 untuk pekerjaan kepala rumahtangga adalah agraris (pertanian, pertambangan dan galian) dan 0 untuk lainnya.

- f. Tingkat pendidikan yaitu lama tahun bersekolah kepala rumahtangga yang dinyatakan dalam satuan tahun.
- g. Tingkat kesehatan yaitu kondisi kesehatan kepala rumahtangga selama satu bulan terakhir saat survei. Ukurannya dinyatakan dengan variabel dummy yaitu 1 untuk mengalami keluhan kesehatan dan 0 untuk lainnya.
- h. Fasilitas listrik yaitu sumber penerangan yang menggunakan variabel dummy menjadi 0 untuk sumber penerangan adalah listrik, baik PLN maupun non PLN dan 1 untuk lainnya.

5.4. Teknik analisis

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Deskripsi data

Data yang diperoleh yang berhubungan dengan masing-masing variabel sebelum dianalisis secara kuantitatif, terlebih dahulu disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan dianalisis dengan statistik deskriptif. Hal ini akan sangat berguna dalam menampilkan data yang tidak dianalisis dengan statistik inferensial.

b. Pendugaan

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari lokasi geografis, beban ketergantungan, gender kepala rumahtangga, pekerjaan utama kepala rumahtangga, tingkat pendidikan kepala rumahtangga, tingkat kesehatan kepala rumahtangga, dan ketersediaan fasilitas listrik terhadap miskin atau tidak miskinnya suatu rumahtangga dalam studi ini digunakan metode regresi logistik.

Metode regresi logistik digunakan untuk mengkaji hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Perbedaan regresi logistik dengan regresi linier adalah variabel terikat pada regresi logistik merupakan variabel biner atau dikotomis. Variabel bebas pada regresi logistik dapat berupa variabel kategorik atau interval, sedangkan untuk regresi linier, variabel terikatnya sekurangnya berskala interval.

Dengan menggunakan model regresi logistik, penelitian ini dapat menunjukkan probabilitas suatu rumah tangga tergolong miskin atau tidak sebagai akibat adanya variabel-variabel bebas yang diduga sebagai faktor penyebab kemiskinan. Probabilitas tersebut merupakan suatu *conditional probability* yang didasarkan kepada suatu asumsi mengenai variabel random yang diteliti berbentuk *Logistic Distribution Function (LDF)*. Model penelitian ini diadaptasi dari Bank Dunia (2007), Amar (2000), Ghaiha (1985), Usman et.al. (2006), dan Anggraeni (2009).

Hasil analisis menggunakan metode regresi logistik tersebut memberikan evaluasi terhadap faktor penentu atau determinan kemiskinan rumah tangga di Sumatera Barat. Menurut Gujarati (2000), model Logistik berasal dari *Logistic Distribution Function* dengan persamaan :

$$P_i = EY = 1/x_1 = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3+\dots\beta_px_p)}} \quad (1)$$

Persamaan (1) di atas kemudian di sederhanakan menjadi :

$$P_i = \frac{1}{1+e^{-Z_i}} \quad (2)$$

Agar persamaan (2) dapat diestimasi, maka persamaan tersebut dimanipulasi dengan cara mengalikan $1+e^{-z_i}$ pada kedua sisinya, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$(1 + e^{-z_i})P_i = \frac{1}{1+e^{-z_i}} \times (1 + e^{-z_i}) \quad (3)$$

Atau $(1 + e^{-z_i})P_i = 1$

$$\frac{(1+e^{-z_i})P_i}{P_i-1} = \frac{1}{P_i-1} \quad (4)$$

Sehingga,

$$e^{z_i} = \frac{P_i}{1-P_i} \quad (5)$$

Karena *range* P_i berkisar antara 0 - 1 dan P_i berhubungan secara non linear dengan Z_i . Jika P_i merupakan notasi untuk daerah dengan kondisi keuangan yang teridentifikasi pada tahapan penelitian pertama, maka $1 - P_i$ merupakan notasi untuk daerah lainnya. Peluang bagi sebuah daerah untuk masuk dalam kelompok yang diidentifikasi pada tahapan pertama penelitian adalah :

$$1 - P_i = \frac{1}{1+e^{-z_i}} \quad (6)$$

Dengan model statistik *Odds Ratio* dengan menggabungkan persamaan (5) dengan persamaan (6) diperoleh persamaan baru sehingga persamaan baru dapat ditulis menjadi :

$$\frac{P_i}{1-P_i} = \frac{1+e^{z_i}}{1+e^{-z_i}} = e^{z_i} \quad (7)$$

Persamaan (7) selanjutnya ditransformasikan menjadi model logaritma natural sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut :

$$L_i = L_n \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = Z_i \quad (8)$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka yang menjadi model spesifik dalam penelitian ini adalah :

$$L_i = L_n \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_7 x_7 + \varepsilon \quad (9)$$

Keterangan :

$L_n \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right]$ = kemungkinan miskin atau tidak miskinnya rumahtangga

β_0 = intersep garis regresi

x_1 = lokasi geografis

x_2 = beban ketergantungan

x_3 = kepala rumahtangga

x_4 = pekerjaan utama

x_5 = tingkat pendidikan

x_6 = tingkat kesehatan

x_7 = ketersediaan listrik

ε = kesalahan pengganggu

Model tersebut diatas diestimasi dengan pendekatan *maximum likelihood* dengan bantuan perangkat lunak SPSS 17.

a. Estimasi Parameter

Estimasi atau pendugaan parameter dalam regresi logistik dilakukan dengan menggunakan metode *maximum likelihood* yang diperoleh dengan menurunkan fungsi kepekatatan peluang bersama (Hosmer dan Lemeshow, 1989). Fungsi kepekatatan peluang bersama ini memiliki persamaan, yaitu :

$$g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) = \prod_{i=1}^n f_i(Y_i)$$

Koefisien regresi logistik didapat dengan memaksimumkan logaritma natural fungsi *maximum likelihood*

$$\log g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) = \log \left[\prod_{i=1}^n \pi_i^{y_i} (1 - \pi_i)^{1-y_i} \right]$$

b. Statistik Uji G

Langkah selanjutnya setelah estimasi parameter yaitu melakukan pengujian kesesuaian model logistik dengan menggunakan statistik uji G. Statistik uji G adalah uji rasio kemungkinan maksimum (*likelihood ratio test*) yang digunakan untuk menguji peranan variabel bebas secara bersamaan atau keseluruhan. Rumus untuk uji G yaitu :

$$G = -2 \ln \left[\frac{L_0}{L_1} \right]$$

dimana : L_0 = nilai *likelihood* tanpa variabel bebas

L_1 = nilai *likelihood* dengan semua variabel bebas

Dengan hipotesis :

d. Interpretasi Koefisien

Interpretasi koefisien pada regresi logistik berbeda dengan regresi linier. Pada regresi logistik, interpretasinya menggunakan rasio odds. Rasio odds adalah suatu alat untuk mengukur asosiasi sebagaimana menduga seberapa mirip, dekat, memiliki ciri peubah terikat atau tidak mirip maupun dekat. Untuk hasil pendugaan tersebut terjadi atau hadir untuk $x=1$ dibandingkan sesuatu terjadi atau hadir untuk $x=0$, dimana $x=0$ adalah variabel kategori yang menjadi referensinya.

Dalam interpretasi koefisien dari rasio odds untuk variabel bebas yang berskala nominal, $x=1$ memiliki kecenderungan untuk $y=1$ sebesar Ψ kali dibandingkan dengan peubah $x=0$, sedangkan untuk variabel bebas yang berskala kontinyu, jika Ψ lebih besar atau sama dengan satu, maka semakin besar nilai variabel x diikuti dengan semakin besarnya kecenderungan untuk $y = 1$.

Rasio odds tidak membutuhkan variabel bebas yang menyebar normal dan juga hubungan antar variabel bebas dari homoskedastisitas, sehingga regresi logistik tidak membutuhkan uji normalitas dan heteroskedasitas. Dalam model regresi logistik, rasio odds didefinisikan sebagai :

$$\Psi = \exp(\beta)$$

dimana β adalah koefisien dari model regresi logistik. Rasio odds memiliki selang kepercayaan yaitu (Hosmer dan Lemeshow, 1989) :

$$\exp \left[\hat{\beta}_i \pm Z_{1-\alpha/2} \times \widehat{SE}(\hat{\beta}_i) \right]$$

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1. Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Kondisi Geografis Sumatera Barat

Daerah Sumatera Barat terletak di pantai barat tengah dengan daerah meliputi daratan dan daerah kepulauan. Posisi Sumatera Barat terletak antara 0°54" Lintang Utara dan 3°30" Lintang Selatan serta 98° 36' dan 101°53" bujur timur dengan luas wilayah sekitar 42.229,13 km², luas tersebut setara dengan 2,18 persen dari luas wilayah Negara Republik Indonesia.

Sumatera Barat terletak pada bagian tengah sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara di sebelah utara, Propinsi Jambi dan Bengkulu sebelah selatan, Propinsi Riau di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat.

Kondisi alam Sumatera Barat diliputi oleh kawasan hutan yaitu sekitar 60,59 persen dari keseluruhan. Sedangkan luas lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian sekitar 28,55 persen. Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Diantara 19 kabupaten/kota, kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah yang terluas yaitu 6,01 ribu km². Sembilan belas kabupaten/kota terbagi dalam 144 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi atas 53 nagari dan 1974 kelurahan.

Ketinggian permukaan daratan propinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada daerah dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir

Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Kondisi alam Sumatera Barat sampai saat ini masih diliputi oleh kawasan hutan lindung yang mencapai sekitar 45,17 persen dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sekitar 54,82 persen.

Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di hampir semua kabupaten, yaitu ada sekitar 17 gunung. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 meter yang terletak di Kabupaten Pasaman. Sumatera Barat juga memiliki danau yang berjumlah sekitar 4 danau, satu berada di Kabupaten Agam yaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya berada di Kabupaten Solok. Danau Singkarak merupakan danau terluas yaitu sekitar 13.011 ha.

Secara umum Propinsi Sumatera Barat beriklim sedang dengan temperatur antara 32°C sampai 36°C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 2000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September sampai Februari.

b. Keadaan Penduduk Sumatera Barat

Kesejahteraan penduduk adalah sasaran utama pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai jika pemerintah tidak melakukan analisis yang serius dalam menyikapi permasalahan kepadatan penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Penduduk adalah sumber daya yang sangat berguna dalam melakukan setiap kegiatan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk pada umumnya selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya di Sumatera Barat. Perkembangan

penduduk berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Penduduk yang berada di Kota Padang lebih banyak daripada di kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan kota Padang sebagai pusat industri yang banyak memberikan daya tarik kota seperti lapangan pekerjaan yang menjadi daerah pilihan penduduk dalam mencari pekerjaan. Kota Padang juga menyediakan fasilitas informasi, pendidikan, hiburan dan teknologi serta berbagai kegiatan lainnya yang dapat menambah tingkat pendapatan penduduk.

Propinsi Sumatera Barat dihuni oleh beragam suku bangsa namun mayoritas penduduknya adalah Suku Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilinial) dan pada umumnya memeluk agama Islam.

Jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Jumlah penduduk yang tertinggi terdapat di Kota Padang sebesar 875.548 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat Kota Sawahlunto sebesar 54.685 jiwa. Daerah yang paling luas adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 6.011,35 km². Sedangkan daerah yang paling kecil luasnya adalah Kota Padang Panjang sebesar 23,00 km².

Berdasarkan kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat diklasifikasikan mulai dari golongan jarang sampai sangat padat. Daerah-daerah yang tergolong padat penduduknya umumnya ditemui di wilayah perkotaan, kecuali Kota Sawahlunto lebih rendah daripada Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman, namun demikian 75 persen dari penduduk Sumatera Barat berdomisili di wilayah Kabupaten. Hal itu terjadi karena wilayah Kabupaten lebih luas daripada wilayah

Kota. Terbukti wilayah Kabupaten mencakup 97 persen dari total luas Propinsi Sumatera Barat, sedangkan kota hanya 3 persen saja. Persebaran penduduk pada setiap daerah disajikan pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009**

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan
			Laki-Laki	Perempuan	Total	
	Kabupaten					
1	Kep. Mentawai	6.011,35	36.421	32.543	68.964	11
2	Pesisir Selatan	5.794,95	222.234	226.254	448.448	77
3	Solok	3.738,00	176.337	183.482	359.819	96
4	Sijunjung	3.130,80	101.390	105.592	206.982	66
5	Tanah Datar	1.336,00	165.074	171.530	336.604	252
6	Padang Pariaman	1.328,79	179.760	209.975	389.735	293
7	Agam	2.232,30	208.421	222.732	431.153	193
8	Lima Puluh Kota	3.354,30	161.380	172.541	333.921	100
9	Pasaman	4.447,63	128.968	132.611	261.579	59
10	Solok Selatan	3.346,20	67.046	66.758	133.804	40
11	Dharmasraya	2.961,13	94.003	92.351	186.354	63
12	Pasaman Barat	3.378,77	169.758	168.809	338.567	100
	Kota					
1	Padang	693,66	435.672	439.876	875.548	1.199
2	Solok	71,29	29.063	30.774	59.837	1.030
3	Sawahlunto	231,93	26.649	28.036	54.685	208
4	Padang Panjang	23,00	28.711	27.780	56.491	2.044
5	Bukittinggi	25,24	50.591	57.214	107.805	4.410
6	Payakumbuh	85,22	52.689	54.222	106.911	1.453
7	Pariaman	66,13	33.432	37.294	70.726	1.078
Total		42.256,69	2.367.599	2.460.370	4.827.933	12.772

Sumber: BPS, Tahun 2012

Berdasarkan persebaran penduduk di daerah Kabupaten dan Kota, Kota Padang sebagai ibukota provinsi menduduki urutan teratas, yaitu sebesar 16,99 persen, sedangkan Kota Padang Panjang menduduki urutan terbawah yang hanya 0,95 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang terpadat adalah Kota Padang Panjang sebesar 2.044/km², sedangkan wilayah yang tergolong jarang adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kepadatan penduduk 11/km².

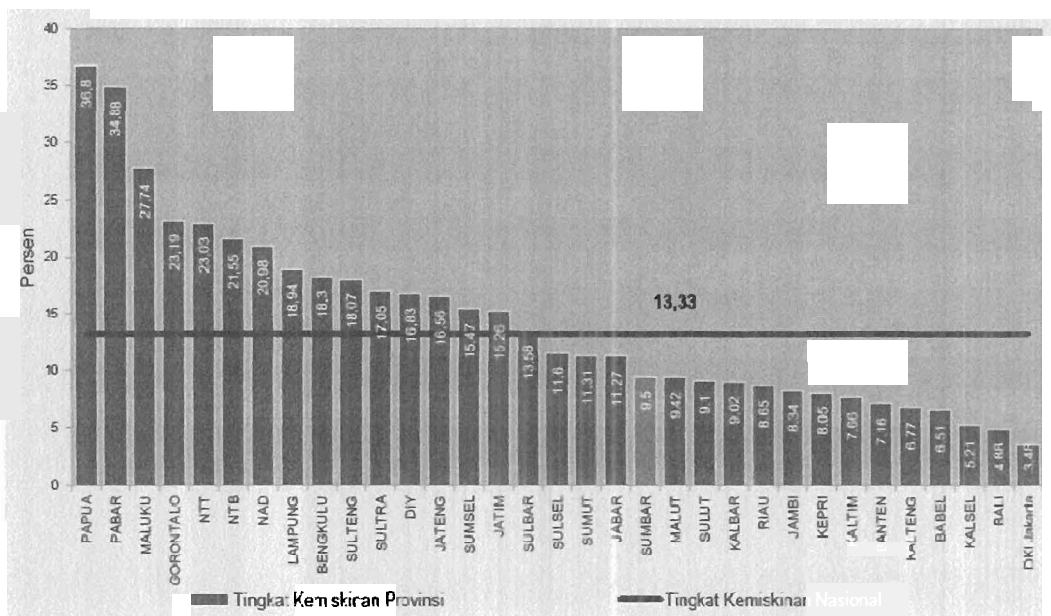
c. Tingkat Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara lebih tajam diukur dari tingkat kemiskinan per kepala (*headcount index poverty*). Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan Sumatera Barat terhitung sebesar 9,5 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional sebesar 13,33 persen, maka tingkat kemiskinan Sumatera Barat tergolong rendah. Jika dilakukan pemeringkatan, Sumatera Barat menempati peringkat 14 terendah pada tingkat kemiskinan. Provinsi dengan kemiskinan terendah yaitu DKI Jakarta dengan 3,48 persen, sedangkan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua dengan 35,8 persen. Perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi ini tersaji pada gambar 6.1.

Dari perbandingan antar provinsi dapat diamati bahwa diantara ciri kemiskinan di Indonesia adalah pentingnya aspek kewilayahan. Tingginya keanekaragaman di tiap-tiap wilayah Indonesia dari segi zona iklim pertanian mengakibatkan tingkat kemiskinan setiap provinsi, baik diantara provinsi dalam pulau yang berbeda bahkan pulau yang sama menjadi sangat berbeda. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh kelembagaan dan sejarah penanganan kemiskinan yang berbeda pada setiap

wilayah, serta perbedaan setiap daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan

Gambar 6.1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dibandingkan Propinsi-propinsi dan Nasional Tahun 2010



Sumber : Badan Pusat Statistik (2011) dalam Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2012 : 5)

Keragaman tingkat kemiskinan tidak hanya terjadi pada level propinsi. Setiap propinsi juga mencatatkan keragaman yang tinggi dalam tingkat kemiskinan antar daerah. Tidak terkecuali untuk Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan sebesar 9,5 persen pada tahun 2010 memiliki variasi yang tinggi yaitu dari 2,47 persen di Kota Sawahlunto hingga 19,74 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tingkat kemiskinan setiap daerah disajikan pada tabel 6.2.

**Tabel 6.2. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010**

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskn (%)		Jumlah Penduduk Miskn (Jlwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
KEPULAUAN MENTAWAI	165 814	186 381	20,54	19,74	13 233	15 086
PESISIR SELATAN	223 328	251 029	10,56	10,22	44 260	43 901
SOLOK	233 097	262 010	12,15	11,74	40 814	41 956
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	216 968	243 880	9,80	10,45	18 954	21 067
TANAH DATAR	216 986	243 901	6,93	6,99	21 778	21 346
PADANG PARIAMAN	231 533	260 252	12,41	11,86	45 154	46 270
AGAM	201 074	226 016	9,66	9,94	39 693	41 842
LIMA PULUH KOTO	222 435	250 026	9,98	10,47	31 118	36 468
PASAMAN	202 452	227 564	12,47	10,96	30 463	27 739
SOLOK SELATAN	195 997	220 308	11,66	11,11	14 577	16 027
DHARMASRAYA	229 181	257 609	11,40	10,56	19 870	20 199
PASAMAN BARAT	229 667	258 155	9,61	9,59	30 383	34 982
KOTA PADANG	272 229	306 109	5,72	6,31	46 819	50 627
KOTA SOLOK	247 635	278 351	6,76	6,99	3 781	4 147
KOTA SAWAH LUNTO	184 976	207 920	2,42	2,47	1 234	1 405
KOTA PADANG PANJANG	244 490	274 816	7,58	7,60	4 007	3 571
KOTA BUKITTINGGI	257 496	289 435	6,19	6,82	6 237	7 568
KOTA PAYAKUMBUH	257 805	289 783	10,15	10,58	10 132	12 367
KOTA PARIAMAN	239 204	268 975	5,48	5,90	3 617	4 660
SUMATERA BARAT	217 469	230 823	9,54	9,5	428 108	457 210
IDONESIA	220 996	242 815	14,15	13,33	31 762 840	30 996 810

Sumber : Badan Pusat Statistik (2011) dalam Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2012 : hal 5)

Secara umum, ciri kemiskinan antar daerah di Sumatera Barat relatif sama dengan ciri kemiskinan secara nasional. Daerah berstatus kabupaten memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan daerah berstatus kota. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks, diantaranya perbedaan kondisi

awal dalam tingkat pembangunan, kota memiliki luas wilayah yang relatif lebih kecil dan penduduk yang relatif lebih sedikit sehingga pengelolaannya lebih sederhana. Kondisi sumberdaya manusia daerah kota relatif lebih baik, dukungan sarana dan prasarana, serta karena aspek lokasinya yang mempengaruhi aksesibilitas informasi, teknologi, kesuburan lahan, dan perbedaan tingkat pekerjaan.

d. Pembangunan Manusia

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya dalam melakukan pembangunan manusia. Dalam konsep pembangunan manusia, kemiskinan tidak hanya diukur dari kekurangan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan perumahan. Lebih dari itu, sebagaimana menjadi tujuan inti pembangunan, pengentasan kemiskinan pada dasarnya adalah pemenuhan hak dasar untuk meningkatkan keberfungsian untuk menjadi manusia seutuhnya melalui pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan penyediaan kesempatan kerja.

Pembangunan manusia di Sumatera Barat diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia. Sumatera Barat tercatat memiliki IPM sebesar 73,78 pada tahun 2010. Nilai IPM ini lebih tinggi dari angka nasional sebesar 72,27 yang menempatkan Sumatera Barat pada ranking 9. Dibandingkan beberapa propinsi tetangga, posisi ini tepat setelah Propinsi Sumatera Utara pada ranking kedelapan. Propinsi Riau dan Kepulauan Riau secara berturut-turut menempati posisi ketiga dan kelima. Sementara itu, Propinsi Bengkulu menempati posisi 11 dan Propinsi Jambi pada peringkat 13.

Indeks Pembangunan Manusia propinsi dibentuk oleh pembangun manusia pada setiap daerah. Gambaran lebih rinci yang ditunjukkan pada setiap daerah



menarik untuk dicermati. Daerah dengan IPM tertinggi dicapai oleh Kota Bukittinggi yang pada tahun 2010 tercatat sebesar 78,26, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten kepulauan Mentawai sebesar 68,75. Indeks Pembangunan Manusia setiap daerah disajikan pada tabel 6.3.

Tabel 6.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rupiah PPP)			
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
KEPULAUAN MENTAWAI	68,36	68,45	92,44	93,58	6,51	6,51	606,23	606,53	68,42	68,75
PESISIR SELATAN	67,03	67,31	93,32	94,92	7,84	7,84	628,93	629,30	70,61	71,15
SOLOK	66,25	66,60	97,11	97,19	7,54	7,60	623,85	627,25	70,41	70,93
SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG	66,58	66,92	93,42	94,78	7,43	7,43	632,74	633,55	70,37	70,92
TANAH DATAR	70,58	70,94	96,64	97,10	8,23	8,35	628,06	628,88	73,54	74,00
PADANG PARIAMAN	68,28	68,65	94,47	94,49	7,25	7,26	629,28	630,40	71,15	71,45
AGAM	68,85	69,04	97,84	97,85	8,27	8,50	628,31	629,65	72,90	73,28
LIMAPULUH KOTO	68,08	68,45	98,71	98,85	7,80	7,94	608,70	609,70	70,80	71,22
PASAMAN	67,10	67,44	98,40	98,73	7,58	7,61	638,48	639,84	72,32	72,71
SOLOK SELATAN	64,48	64,61	97,38	97,53	7,76	7,82	611,11	613,28	68,67	68,98
DHARMAS RAYA	65,75	66,00	95,83	96,38	7,66	7,77	606,62	608,89	68,60	69,13
PASAMAN BARAT	64,88	65,15	98,18	98,20	7,98	8,00	619,52	621,31	69,87	70,18
KOTA PADANG	70,64	70,89	99,49	99,49	10,89	10,91	644,31	647,24	77,43	77,81
KOTA SOLOK	69,51	69,69	98,51	98,51	10,29	10,43	632,50	635,24	75,23	75,65
KOTA SAWAH LUNTO	71,44	71,65	98,50	98,55	9,13	9,14	623,01	624,52	74,71	74,96
KOTA PADANG PANJANG	70,95	71,30	99,29	99,30	10,22	10,23	645,60	646,57	77,15	77,45
KOTA BUKIT TINGGI	71,37	71,53	99,55	99,92	10,47	10,50	648,49	651,09	77,85	78,26
KOTA PAYAKUMBUH	70,46	70,62	99,17	99,18	9,46	9,66	633,52	636,22	75,37	75,81
KOTA PARIAMAN	68,79	69,02	98,36	98,92	9,73	9,90	628,14	628,66	74,05	74,46
SUMATERA BARAT	69,25	69,50	96,81	97,09	8,45	8,48	633,72	635,29	73,44	73,78
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,82	631,48	633,64	71,75	72,27

Daerah-daerah berstatus kota juga terlihat memiliki IPM relatif lebih tinggi daripada daerah kabupaten. Nilai IPM semua daerah kota melebihi angka propinsi. Sementara daerah-daerah kabupaten memiliki IPM yang lebih rendah daripada angka propinsi, kecuali Kabupaten Tanah Datar.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

a. Rumahtangga Sampel dan Tingkat Kemiskinan Rumahtangga.

Penelitian yang menggunakan data Kor Susenas 2009 ini mencakup 11.070 rumahtangga sampel. Rumahtangga sampel tersebar secara proporsional pada seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, sehingga sampel yang terambil dapat mewakili kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Sebaran sampel ini tersaji pada tabel 6.4.

Tabel 6.4. Jumlah Rumahtangga Sampel dan Kategori Kesejahteraan Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2009

Daerah	RT Sampel Susenas 2009	Bukan Miskin	Miskin	% RT Miskin
Kepulauan Mentawai	448	410	38	8,48
Pesisir Selatan	640	624	16	2,50
Kab. Solok	670	647	23	3,43
Sijunjung	576	527	49	8,51
Tanah Datar	608	598	10	1,64
Padang Pariaman	640	596	44	6,88
Agam	640	602	38	5,94
Limapuluh Kota	608	591	17	2,80
Pasaman	704	636	68	9,66
Solok Selatan	608	554	54	8,88
Dharmasraya	608	592	16	2,63
Pasaman Barat	608	585	23	3,78
Padang	832	817	15	1,80
Kota Solok	448	441	7	1,56
Sawahlunto	448	441	7	1,56
Padang Panjang	416	411	5	1,20
Bukittinggi	480	464	16	3,33
Payakumbuh	480	471	9	1,88
Kota Pariaman	608	579	29	4,77
Total	11070	10586	484	4,37

Sumber : Susenas Kor 2009, diolah.

Dengan menggunakan garis kemiskinan pada setiap kabupaten dan kota pada tahun 2009 sebagaimana telah ditunjukkan oleh tabel 6.2., maka dapat ditentukan tingkat kemiskinan rumahtangga. Perlu digarisbawahi bahwa tingkat kemiskinan rumahtangga pada penelitian ini berbeda dari tingkat kemiskinan pada tabel 5.5 yang merupakan kemiskinan per kepala. Diperoleh hasil bahwa jumlah rumahtangga miskin yaitu sebesar 4,37 persen. Tingkat kemiskinan rumahtangga ini memiliki interval dari yang terendah pada Kota Padang Panjang sebesar 1,2 persen rumahtangga hingga yang tertinggi di Kabupaten Solok Selatan sebesar 8,88 persen.

b. Lokasi Geografis

Lokasi geografis biasanya sangat menentukan perkembangan kemajuan atau kemunduran sebuah masyarakat. Beberapa studi yang dilakukan di beberapa wilayah menunjukkan pentingnya faktor lokasi geografis dalam pemetaan masalah kemiskinan. Studi Bloom dan Sachs (1998) menguraikan keterkaitan antara geografi, demografi dan pertumbuhan ekonomi di Afrika, yang menyimpulkan bahwa faktor geografis menyebabkan permasalahan demografis yang mendorong peningkatan kemiskinan di Afrika.

Sementara itu, studi Demurger et, al (1999) di China juga menemukan hal yang sama, yakni permasalahan geografi menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi regional yang pada gilirannya mendorong kemiskinan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Sachs et, al (2002) dalam memahami pertumbuhan ekonomi India, yang menemukan bahwa problema geografis yang menyebabkan kemiskinan sulit ditanggulangi.

jumlah mereka yang miskin sebesar 4,4 persen. Sementara untuk lokasi yang bukan pesisir, tingkat rumahtangga miskin sebesar 4,1 persen.

Secara keseluruhan dari total sampel rumahtangga yang diteliti sebanyak 11.070 unit, ada sebesar 3,97 persen rumahtangga miskin yang tinggal di daerah bukan pesisir, sedangkan rumahtangga miskin tinggal di daerah pesisir sebesar 2,42 persen. Tabel 6.5. menyajikan tabulasi silang antara kondisi kesejahteraan rumahtangga menurut lokasi geografis.

Tabel 6.5. Lokasi Geografis Rumahtangga Menurut Kondisi Kesejahteraan Sumatera Barat 2009

Lokasi Geografis	Kondisi Kesejahteraan		Total
	Tidak Miskin	Miskin	
Bukan Pesisir (persentase)	9487 (95,6)	438 (4,4)	9925 (89,7)
Pesisir (persentase)	1099 (95,9)	46 (4,1)	1145 (10,3)
Jumlah	10586	484	11070

Sumber: Data diolah, 2012

c. Beban Ketergantungan

Beban ketergantungan rumahtangga menjadi faktor yang turut menentukan bagi kondisi kesejahteraan rumahtangga. Beban ketergantungan diukur dari rasio penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Rumahtangga dengan banyak penduduk tidak produktif menjadikan lebih banyak anggota rumahtangga yang harus dipenuhi kebutuhan ekonominya. Pada saat bersamaan, sumbangannya bagi pendapatan rumahtangga belum ada atau masih kecil. Pada

akhirnya menyebabkan menurunnya pendapat per kapita rumahtangga yang dapat menjadikan rumahtangga tersebut tergolong miskin.

Dalam konteks penelitian ini, rasio ketergantungan dihitung dengan persentase anggota rumahtangga berumur kurang dari 10 tahun terhadap total anggota rumahtangga. Definisi ini disesuaikan dengan ketersediaan data Susenas. Definisi ini beralasan pula secara konseptual, batas minimum usia produktif yang dianut oleh Indonesia ialah 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai usia kerja. Perbandingan beban ketergantungan dan ukuran demografinya lainnya tersaji pada tabel 6.6.

**Tabel 6.6. Beban Ketergantungan dan Ukuran Demografis
Rumahtangga Menurut Kondisi Kesejahteraan
di Sumatera Barat Tahun 2009**

Ukuran	Kondisi Kesejahteraan	
	Tidak Miskin	Miskin
Rata-rata Beban Ketergantungan (%)	29,1	16,7
Rata-rata jumlah anggota rumahtangga	4,1	5,5
Rata-rata jumlah anak	0,8	1,7

Sumber : Data diolah, 2012.

Hasil penghitungan memperlihatkan bahwa beban ketergantungan antara rumahtangga miskin dan tidak miskin relatif berbeda. Rumahtangga miskin memiliki beban ketergantungan yang lebih tinggi dengan rata-rata 29,1 dibandingkan beban ketergantungan rumahtangga tidak miskin yang hanya 16,7 persen.

Tinjauan lebih mendalam memperlihatkan bahwa rata-rata jumlah anggota rumahtangga miskin lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rata-rata jumlah anggota rumahtangga miskin yaitu 5,49 orang dibandingkan rata-rata jumlah anggota rumahtangga tidak miskin sebesar 4,08 orang. Hal ini dapat disebabkan oleh lebih banyak jumlah anak berusia kurang dari 10 tahun pada rumahtangga miskin dengan rata-rata sebesar 1,68 atau mendekati 2 orang dibandingkan jumlah anak pada rumahtangga tidak miskin sebesar 0,8 atau 1 orang.

d. Gender dari Kepala Keluarga

Persoalan gender merupakan persoalan yang cukup besar khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Tetapi hal ini berbeda dan unik dengan ditemukan masalah gender ini terutama untuk kasus Sumatera Barat. Justru jumlah kepala keluarga yang banyak miskin itu adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini mungkin disebabkan sistem sosial dengan kekerabatan menurut garis keturunan berasal dari ibu (matrilinial) sehingga warisan kekayaan juga diturunkan menurut garis ibu.

Aspek gender berkaitan pula dengan kemiskinan. Diantara karakteristik umum kemiskinan yaitu lebih banyak kemiskinan yang dialami oleh perempuan. Rumahtangga yang dikepalai perempuan cenderung memiliki pekerjaan informal dengan upah yang rendah. Keyakinan umum menyatakan bahwa pendapatan rumahtangga yang dikepalai perempuan cenderung juga lebih rendah karena menjadi sumber pendapatan tunggal dibandingkan pendapatan rumahtangga yang dikepalai laki-laki yang kemungkinan dapat ditopang oleh pendapatan istri.

Kondisi kesejahteraan menurut gender kepala rumahtangga menunjukkan kurang terbuktinya keyakinan umum tersebut. Dari 11.070 rumahtangga di Sumatera Barat terdapat 1.781 rumahtangga atau 16,1 persen rumahtangga dikepalai oleh perempuan. Selebihnya, sejumlah 9.289 rumahtangga dikepalai oleh laki-laki Sebagaimana disajikan pada tabel 6.7.

Tabel 6.7. Kondisi Kesejahteraan Menurut Gender Kepala Keluarga Sumatera Barat Tahun 2009

Gender	Miskin		Total
	Tidak Miskin	Miskin	
Laki-laki (persentase)	8874 (95,5)	415 (4,5)	9289 (83,9)
Perempuan (persentase)	1712 (96,1)	69 (3,9)	1781 (16,1)

Sumber: Data diolah, 2012

Berdasarkan data tersebut terungkap pula bahwa kepala rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki sebesar 4,47 persen terhadap total kepala rumahtangga laki-laki. Kepala rumah tangga miskin yang perempuan hanya 3,87 persen dari total kepala rumahtangga perempuan. Sementara itu, secara keseluruhan jumlah kepala rumah tangga laki-laki yang miskin terhadap semua jumlah kepala rumah tangga adalah sebesar 3,75 persen, tetapi untuk kepala rumah tangga perempuan yang miskin hanya sebesar 0,62 persen. Deskripsi penelitian ini tampak berbeda dari keyakinan umum bahwa rumahtangga yang dikepalai perempuan cenderung lebih banyak tergolong miskin dibandingkan rumahtangga yang dikepalai laki-laki.

e. Pekerjaan Utama

Lahan pertanian dan tingkat teknologi yang digunakan dalam mata pencaharian adalah penentu produktivitas dalam proses produksi usaha tani. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut akan menentukan jenis dan ukuran usaha tani yang mereka lakukan. Jenis dan ukuran usaha tani tersebut akan menentukan besarnya pendapatan masing-masing rumah tangga dan pada gilirannya hal tersebut akan menentukan status miskin atau tidak miskinnya rumah tangga tersebut. Pada umumnya mata pencarian selain bidang pertanian mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga peluang kepala rumah tangga jadi miskin semakin kecil.

Kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan pemilikan aset produksi terutama tanah sebagai lahan pertanian dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Meratanya distribusi penguasaan lahan akan sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat, karena lahan adalah faktor produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan pendapatan rumah tangga. Dengan meratanya distribusi penguasaan lahan maka berdampak terhadap jenis dan skala usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tidak beragam demikian pula dengan tingkat penghasilan yang mereka terima.

Masyarakat miskin menguasai lahan relatif sempit tetapi lebih merata jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak berstatus miskin, demikian juga dengan distribusi pendapatannya. Meratanya distribusi pendapatan masyarakat miskin disebabkan usaha tani yang dilakukannya berskala kecil dan penggunaan tenaga kerja di luar rumah tangga cenderung tidak dibayar karena adanya pertukaran tenaga kerja di antara mereka secara resiprokal. Berbeda dengan petani mampu yang cenderung mengandalkan modal dengan prinsip efisiensi. Pekerjaan utama kepala

rumahtangga yang dibedakan menjadi pertanian dan non-pertanian ditunjukkan pada tabel 6.8.

Tabel 6.8. Pekerjaan Utama pada Pertanian Menurut Kondisi Kesejahteraan Sumatera Barat Tahun 2009

Pekerjaan	Miskin		Total
	Tidak Miskin	Miskin	
Non-Pertanian (persentase)	6.239 (97,3)	175 (2,7)	6.414 (57,9)
Pertanian (persentase)	4.347 (93,4)	309 (6,6)	4.656 (42,1)

Sumber: data diolah, 2012

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian kepala rumahtangga di Sumatera Barat lebih banyak pada kegiatan non-pertanian yaitu sebesar 6.414 kepala rumah tangga atau sebanyak 57,9 persen. Angka ini tidak berbeda sangat tajam dengan kepala rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian yaitu 4.656 orang atau 42,1 persen.

Jumlah kepala rumah tangga dengan mata pencarian pertanian lebih sedikit dibandingkan non-pertanian. Namun demikian, jumlah kepala rumah tangga yang miskin lebih banyak terjadi pada kepala rumahtangga dengan pekerjaan pada sektor pertanian yaitu sebesar 6,64 persen. Sementara itu, kepala rumahtangga yang miskin yang bekerja pada bidang non-pertanian hanya sebesar 2,73 persen.

Secara keseluruhan dari sampel yang dilakukan dalam penelitian ini, kepala rumah tangga miskin yang bekerja di bidang pertanian sebesar 2,79 persen, akan tetapi kepala rumah tangga miskin yang berada di bidang non-pertanian hanya sebesar 1,58 persen.

f. Tingkat Pendidikan

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan dan mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Tingkat pendidikan adalah kunci penting dalam membangun masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Propinsi Sumatera Barat.

Tingkat pendidikan kepala rumahtangga di Sumatera Barat pada penelitian ini menggunakan lama sekolah yang dinyatakan dalam tahun. Secara keseluruhan, terdapat 310 kepala rumahtangga atau 2,8 persen yang tidak pernah sekolah. Jika dibedakan menurut kondisi kesejahteraannya, lebih banyak kepala rumahtangga miskin yang tidak pernah sekolah dibanding kepala rumahtangga tidak miskin yaitu 5,8 persen berbanding 2,7 persen.

Pada lama sekolah dalam interval 1 hingga 5 tahun yang mencerminkan kepala rumahtangga pernah mengenyam pendidikan SD namun tidak menamatkannya. Terlihat bahwa angka pada rumahtangga miskin sebesar 38,6 persen dibandingkan rumahtangga tidak miskin sebesar 22,5 persen. Fakta ini menunjukkan keyakinan umum bahwa kepala rumahtangga miskin berasal dari latarbelakang pendidikan yang mengalami putus sekolah lebih besar dibandingkan rumahtangga tidak miskin.

Pada interval pendidikan 6-8 tahun mengindikasikan bahwa kepala rumahtangga sekurangnya mampu menamatkan SD dan dinataranya terdapat yang melanjutkan ke jenjang SLTP, namun tidak mampu menyelesaikannya. Angka pada

rumahtangga miskin sebesar 30,8 persen daripada rumahtangga miskin sebesar 24,6 persen.

Bila diamati interval pendidikan dari 0 tahun atau tidak bersekolah hingga kurang dari 9 tahun, maka rumahtangga miskin berasal dari kepala rumahtangga yang sangat terkonsentrasi pada tingkat pendidikan rendah atau kurang dari 9 tahun sebagai acuan wajib belajar saat ini. Sebanyak 75,2 persen kepala rumahtangga berasal dari latarbelakang pendidikan yang tidak mampu menamatkan jenjang SLTP. Selebihnya yang menamatkan hingga SLTP hanya 13,6 persen dan menamatkan SLTA atau tambahan pendidikan 1 tahun (kursus atau putus sekolah pada perguruan tinggi) sebanyak 10,1 persen. Interval pendidikan ini dapat dicermati pada tabel 6.9.

Tabel 6.9. Tingkat Pendidikan Kepala Rumhtangga Menurut Kondisi Kesejahteraan Rumahtangga Di Sumatera Barat 2009

Tingkat Pendidikan	Kondisi Kesejahteraan				Total	
	Tidak Miskin		Miskin			
	Fi	%	Fi	%	Fi	%
Interval Lama Pendidikan						
- 0 tahun (tdk sekolah)	282	2,7	28	5,8	310	2,8
- 1 - 5 tahun	2384	22,5	187	38,6	2571	23,2
- 6 - 8 tahun	2605	24,6	149	30,8	2754	24,9
- 9 - 11 tahun	1885	17,8	66	13,6	1951	17,6
- 12 - 13 tahun	2460	23,2	49	10,1	2509	22,7
- ≥ 14 tahun	970	9,2	5	1,0	975	8,8
Total	10586	100,0	484	100,0	11070	100,0
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	5,78		8,13		8,03	

Sumber : Data diolah, 2012.

Perbandingan tingkat pendidikan semakin berbeda tajam jika diamati pada jenjang SLTA dan pendidikan tinggi. Pada rumahtangga tidak miskin, sebanyak 23,2 persen kepala rumahtangga telah mampu menamatkan SLTA. Bahkan 9,2 persen rumahtangga tidak miskin pernah menempuh dan menamatkan perguruan tinggi dibandingkan pendidikan kepala rumahtangga miskin hingga perguruan tinggi yang hanya sebesar 1 persen.

Pada penelitian ini dapat diperoleh indikator pendidikan berupa rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kepala rumahtangga di Sumatera Barat tahun 2009 terhitung selama 8,03 tahun. Perbandingan rata-rata lama sekolah menurut kondisi kesejahteraan rumahtangga mengungkapkan terjadinya perbedaan yang tajam dalam rata-rata lama sekolah kepala rumahtangga yaitu 5,78 tahun bagi kepala rumahtangga miskin dibandingkan 8,13 tahun pada kepala rumahtangga tidak miskin.

g. Tingkat Kesehatan

Kondisi kesehatan kepala rumahtangga sangat menentukan untuk menghasilkan pendapatan rumahtangga. Kepala rumahtangga yang sehat cenderung memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, kepala rumahtangga yang mengalami kondisi sakit dapat menyebabkan turunnya produktivitas. Bahkan menimbulkan biaya kesempatan berupa hari yang hilang karena sakit (hari lama sakit) sekaligus meningkatkan pengeluaran rumahtangga untuk biaya berobat.

Indikator tingkat kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya kepala rumahtangga mengalami keluhan kesehatan. Hasil menemukan bahwa tingkat keluhan kesehatan kepala rumahtangga di Sumatera Barat tergolong

tinggi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa sebanyak 5.291 orang kepala rumahtangga atau sebanyak 47,8 persen mengalami keluhan kesehatan, sedangkan yang tidak mengalami keluhan kesehatan yaitu 5.779 orang kepala rumahtangga atau setara dengan 52,2 persen kepala rumahtangga.

Berdasarkan kondisi kesejahteraannya, penduduk tidak miskin yang mengalami keluhan kesehatan yaitu 5.065 orang dari 10.586 kepala rumahtangga tidak miskin atau sebesar 47,8 persen. Kondisi kesehatan ini sedikit lebih rendah dibandingkan kepala rumahtangga miskin yang mengalami keluhan kesehatan yaitu 226 dari 484 kepala rumahtangga miskin atau sebesar 46,7 persen. Sebagaimana disajikan pada tabel 6.10.

**Tabel 6.10. Kondisi Keluhan Kesehatan Kepala Rumahtangga
Menurut Kondisi Kesejahteraan Sumatera Barat 2009**

Keluhan Kesehatan	Kategori		Total
	Tidak Miskin	Miskin	
Tidak ada keluhan (persentase)	5521 (95,5)	258 (4,5)	5779 (52,2)
Ada keluhan (persentase)	5065 (95,7)	226 (4,3)	5291 (47,8)
Jumlah	10586	484	11070

Sumber: Data diolah, 2012

h. Fasilitas Listrik

Ketersediaan infrastruktur sangat mendukung bagi rumahatangga untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan rumahtangga. Infrastruktur yang sangat penting yaitu listrik. Bahkan listrik dapat

dikatakan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia modern. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap listrik. Ketiadaan listrik untuk penerangan yang layak, masih kerap terjadi khususnya di wilayah-wilayah pedesaan sehingga memperburuk akses masyarakat atas listrik.

Akses listrik bagi masyarakat miskin juga merupakan suatu persoalan yang masih dihadapi sampai sekarang terutama yang berada di daerah pedesaan yang terisolir. Tabel 6.11. menyajikan ketersediaan listrik menurut kondisi kesejahteraan rumahtangga.

Tabel 6.11. Ketersediaan Fasilitas Listrik Menurut Kondisi Kesejahteraan Rumahtangga Sumatera Barat Tahun 2009

Fasilitas Listrik	Miskin		Total
	Tidak Miskin	Miskin	
Listrik	1.188 (88,2)	159 (11,8)	1.347 (12,2)
Bukan Listrik	9.398 (96,7)	325 (3,3)	9.723 (87,8)
Jumlah	10586	484	11.070

Sumber: data diolah, 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas listrik yang dinikmati oleh orang miskin sebesar 11,80 persen dari jumlah keseluruhan rumah tangga yang diamati, sementara itu masih ada sekitar 3,34 persen kepala rumah tangga yang tidak menikmati listrik seperti halnya petromak, lampu minyak dan sebagainya.

C. Analisis Induktif

a. Kelayakan dan Kebaikan Model

Uji kelayakan model regresi logistik dapat dilakukan dengan uji Omnibus. Uji Omnibus memperlihatkan korelasi majemuk atau korelasi dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Diperoleh hasil dengan teknik Chi-Square diperoleh nilai Chi-square hitung sebesar 512,5. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti secara bersama-sama semua variabel bebas memiliki hubungan dengan kondisi kesejahteraan atau kemiskinan rumah tangga. Hasil ini ini sekaligus menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah layak untuk dianalisis. Hasil pengujian kelayakan model ini disajikan pada tabel 6.12.

Tabel 6.12. Penilaian Kelayakan Model dengan Uji Omnibus

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	512.529	7	.000
	Block	512.529	7	.000
	Model	512.529	7	.000

Uji kelayakan model dalam regresi logistik didukung oleh perbedaan penaksiran parameter dan nilai R square. Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa dengan variabel bebas yang dimasukkan kepada model telah terjadi perbedaan signifikan dalam penaksiran parameter yang ditunjukkan oleh nilai -2 Log Likelihood sebesar 3463,7 poin. Hasil ini ditunjukkan oleh tabel 6.13.

Tabel 6.13. Tabel Hasil Uji Kebaikan Model

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	3463.746 ^a	.045	.150

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.

Pada tabel 6.15. terungkap pula nilai Cox dan Snell R Square sebesar 0,045. Cox dan Snell Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada regresi berganda biasa yang didasarkan atas estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1, sehingga sulit diinterpretasikan. Modifikasinya yaitu Nagelkerke R Square untuk memastikan nilainya bervariasi dari 0 (nol) hingga 1 (satu) (Ghozali, 2011; 341).

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,15 diinterpretasikan sebagaimana nilai koefisien determinasi pada regresi linier biasa. Hasil ini menyatakan bahwa proporsi varian atau variabilitas kondisi rumah tangga menjadi miskin atau tidak miskin oleh variabel-variabel independen yaitu sebesar 15 persen.

Koefisien determinasi sebesar 15 persen dengan data yang cross-section tergolong cukup baik. Ditambah dengan fakta dan empiris yang menyatakan bahwa persoalan kemiskinan merupakan problem yang sangat kompleks yang ditentukan oleh banyak variabel. Sebagai pembandingan, studi Bank Dunia tentang kemiskinan di Indonesia menggunakan lebih dari sekurangnya 15 variabel pada 4 model dalam menjelaskan pengeluaran rumah tangga, memiliki nilai koefisien determinasi berkisar 35 hingga 47 persen.

Penilaian kelayakan model didukung pula dengan uji kebaikan model

(*goodness of fit*). Uji ini dilakukan untuk menilai model yang digunakan dengan menggunakan tujuh variabel independen sudah sesuai dengan data empiris. Uji kebaikan model dilakukan dengan uji Hosmer and Lemeshow untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan antara model dengan data sehingga model tergolong fit. Jika nilainya sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga goodness of fit dari model tidak karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2011; 341).

Inti dari uji Hosmer dan Lemeshow adalah uji chi-square. Namun terdapat modifikasi dalam tabel kontingensinya yang dibuat menjadi aturan desil sehingga ada 10 tabel sehingga terbentuk tabel nilai statistik uji Hosmer dan Lemeshow.

Uji Hosmer and Lemeshow menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik Chi-Square sebesar 11,74 dengan p-value sebesar 0,163. Dengan hipotesis yang telah dikemukakan, dengan nilai p-value atau probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya. Dengan demikian, model yang dibangun dapat diterima karena cocok dengan data observasinya karena model telah cukup dalam menjelaskan data. Hasil uji Hosmer dan Lemeshow ini disajikan pada tabel 6.14.

Tabel 6.14. Hasil pengolahan Uji Kebaikan Model dengan Uji Hosmer dan Lemeshow

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	11.736	8	.163

b. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Bagian penting selanjutnya setelah pengujian kelayakan dan kebaikan model serta korelasi dan pengujian signifikansi seluruh variabel dependen secara bersama-sama, menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah layak dan baik adalah membentuk persamaan regresi, pengujian signifikansi, interpretasi setiap variabel independen.

Hasil persamaan regresi logistik dibentuk dari nilai konstanta dan nilai koefisien setiap variabel serta uji signifikansi setiap variabel dependen secara parsial. Hasil pengolahan dengan SPSS 17 diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 6.15. Nilai konstanta dan koefisien diperoleh dari kolom B.

Tabel 6.15. Hasil Pengujian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sumatera Barat tahun 2009

Variabel bebas	Nilai Dugaan	S.E.	Nilai Wald Test	Df	Sig.	Exp(B)
lokasi(1)	0.642**	0.171	14.067	1	0.000	1.900
dep_rate	0.037**	0.003	222.542	1	0.000	1.038
genderKK(1)	0.017*	0.145	0.014	1	0.906	1.017
agric(1)	-0.445**	0.108	17.144	1	0.000	0.641
listrik(1)	0.857**	0.114	56.747	1	0.000	2.356
Educ	-0.163**	0.015	117.637	1	0.000	0.849
keluh(1)	0.072*	0.099	0.532	1	0.466	1.075
Constant	-3.409	0.228	223.883	1	0.000	0.033

Keterangan : ** signifikan pada tingkat signifikansi 1%

* tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%

Berdasarkan nilai koefisien, persamaan regresi logistik yang terbentuk yaitu :

$$\ln \left(\frac{\pi}{1-\pi} \right) = -3,41 + 0,64\text{lokasi} + 0,04\text{dep_rate} + 0,02\text{genderKK} - 0,45\text{agric} \\ + 0,86\text{listrik} - 0,16\text{educ} + 0,07\text{keluh}$$

Hasil pengujian signifikansi terhadap 7 variabel bebas yang digunakan ditemukan bahwa 5 variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada derajat kepercayaan 99 persen. Lima variabel yang signifikan tersebut yaitu lokasi geografis (lokasi), beban ketergantungan (dep_rate), pekerjaan utama kepala rumah tangga pada pertanian (agric), dan pendidikan kepala rumah tangga (educ). Sementara itu, dua variabel bebas lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel tersebut yaitu gender kepala rumah tangga (genderKK) dan ada tidaknya keluhan kesakitan (keluh). Hasil ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, terutama terhadap dua variabel yang ditemukan tidak berpengaruh signifikan. Menarik pula untuk dibahas adanya tanda yang negatif pada variabel agric.

Dalam persamaan regresi logistik, nilai koefisien regresi tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagaimana koefisien regresi linier biasa. Interpretasi pada persamaan regresi logistik dilakukan dengan melihat nilai odd rasio. Pada hasil regresi tabel 5.16, nilai odds rasio ditunjukkan oleh nilai $\text{Exp}(B)$.

Nilai rasio odds untuk variabel lokasi yaitu sebesar 1,9. Variabel yang dibedakan menjadi dua kategori (kategorik/non-metrik), yaitu angka 1 untuk daerah pesisir dan 0 untuk lainnya atau bukan pesisir, maka nilai odds rasio ini mengungkapkan bahwa rumah tangga yang berlokasi di daerah pesisir memiliki

peluang 1,9 kali lebih besar tergolong sebagai rumahtangga miskin dibandingkan rumahtangga yang berlokasi di daerah bukan pesisir.

Variabel berikutnya yaitu beban ketergantungan (*dep_rate*) yang memiliki odds rasio 1,04 dan tanda koefisien yang positif. Dengan skala datanya yang rasio (metrik), nilai odds rasio ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam rasio ketergantungan, maka peluang rumahtangga semakin meningkat sebesar 1,04 kali untuk menjadi rumahtangga miskin.

Dilihat dari gender kepala rumahtangga, diperoleh nilai odds rasio sebesar 1,02. Gender kepala rumahtangga yang diacu yaitu perempuan. Hasil ini berarti rumahtangga yang dikepalai perempuan memiliki peluang 1,02 lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan kepala rumahtangga adalah laki-laki. Namun uji signifikansi memperlihatkan bahwa variabel gender kepala rumahtangga tidak signifikan menjelaskan peluang menjadi rumahtangga miskin antara rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki dengan perempuan. Hasil ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam.

Dalam mata pencaharian utama kepala rumahtangga di bidang pertanian diperoleh koefisien bernilai negatif dengan nilai rasio odds kurang dari satu, tepatnya 0,64. Hal ini menyatakan bahwa rumahtangga dengan kepala rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian menurunkan kecenderungan 0,64 kali menjadi rumahtangga miskin dibandingkan kepala rumahtangga yang bekerja di bidang non-pertanian. Nilai odds rasio ini sama maknanya dengan rumahtangga dengan kepala rumahtangga bekerja pada lapangan usaha non-pertanian memiliki peluang 1,5 kali lebih besar untuk menjadi rumahtangga miskin dibandingkan kepala rumahtangga pertanian. Hasil ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut mengingat hasilnya yang

berbeda secara teoritik dan telah menjadi keyakinan umum yang menyatakan bahwa ciri utama kelompok masyarakat atau rumahtangga miskin yaitu bekerja di sektor pertanian.

Selanjutnya diperoleh hasil odds ratio untuk variabel listrik yang menunjukkan ada atau tidaknya sumber penerangan listrik dengan nilai yang positif sebesar 2,36. Variabel ini merupakan skala kategorik yang dibedakan menjadi 0 untuk sumber penerangan adalah listrik, dan 1 untuk sumber penerangan adalah non-listrik. Hasil ini bermakna bahwa rumahtangga yang sumber penerangannya non listrik memiliki peluang atau kecenderungan sebesar 2,3 kali lebih besar untuk menjadi rumah tangga miskin dibandingkan rumah tangga yang sumber penerangannya dari listrik. Nilai odds ratio variabel ini merupakan yang terbesar dinantara variabel bebas lainnya yang menunjukkan besarnya pengaruh listrik sebagai salahsatu indikator ketersediaan infrastruktur terhadap kecenderungan kemiskinan rumahhtangga.

Variabel pendidikan kepala rumah tangga diperoleh hasil dengan nilai koefisien peubah yang negatif dengan nilai rasio odds kurang dari satu. Nilai odd ratio sebesar 0,85 menyatakan bahwa setiap bertambahnya satu tahun bersekolah kepala rumahtangga maka peluang rumhatangga menjadi rumahtangga miskin menurun sebesar 0,85 kali. Artinya penambahan pendidikan kepala rumahtangga memperkecil kecenderungan bagi rumahtangga tersebut menjadi rumahtangga miskin.

Variabel bebas terakhir yaitu keluhan yang merupakan simbol dari indikator tingkat kesehatan yang diindikasikan oleh ada atau tidaknya kepala rumahtangga mengalami keluhan kesehatan selama sebulan sebelum survei dilakukan. Hasilnya

diperoleh rasio odds 1,08 yang mengungkapkan bahwa kepala rumahtangga yang mengalami keluhan kesehatan meningkatkan peluang sebesar 1,08 kali untuk diklasifikasikan sebagai rumahtangga miskin dibandingkan kepala rumahtangga yang tidak mengalami keluhan kesehatan. Namun variabel ini tidak berpengaruh signifikan dalam menjelaskan kecenderungan kemiskinan rumahtangga.

6.2. Pembahasan

a. Pengaruh Lokasi Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lokasi rumahtangga di daerah pesisir berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan atau peluang rumahtangga tersebut tergolong miskin. Peluang rumahtangga berlokasi di pesisir 1,9 kali lebih besar dibandingkan rumahtangga yang berlokasi di daerah bukan pesisir.

Anggraeni (2009:23) mengutip Acemoglu yang menyatakan bahwa penyebab fundamental terjadinya perbedaan kesejahteraan antar negara adalah kondisi geografis, disamping insitusi atau kelembagaan lembaga yang ada. Unsur geografis yang dianggap sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan adalah lokasinya yang menentukan iklim. Selanjutnya, iklim mempengaruhi usaha dalam bekerja, insentif dan produktivitas. Kemudian kondisi geografis juga dapat mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat terutama di bidang pertanian serta adalah hambatan terhadap munculnya potensi penyakit menular.

Aspek kewilayahan atau geografis dan kondisi lingkungan menempati posisi penting dalam memahami kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan kemiskinan sangat beragam antarwilayah Indonesia, baik antara Jawa dan luar Jawa, antara desa dan kota, termasuk antara daerah pesisir dan non-pesisir. Studi Bank Dunia (2007:49)

mengungkapkan bahwa sebagian penduduk miskin tinggal di pinggiran pantai yang kumuh dan tercemar, sementara sebagian lainnya, meskipun jauh lebih sedikit, tinggal di pedalaman hutan atau di gunung-gunung. Penduduk miskin yang tinggal di lingkungan dengan kualitas yang buruk atau rentan tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti penduduk yang tinggal di lingkungan yang lebih baik. Hal tersebut, sebagaimana pula lokasi mereka yang jauh dari pasar, membuat kesempatan atau peluang mereka terbatas. Dataran pantai sepanjang Sumatera Barat dan Sumatera Selatan sempit dan terjal, sehingga para petani di sana lebih mengalami hambatan dibandingkan dengan para petani yang tinggal di sisi utara dan timur pulau tersebut.

Persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat pesisir identik dengan kehidupan sebagai nelayan tradisional. Persoalan kemiskinan pesisir di berbagai segi kehidupan telah banyak memperoleh perhatian. Kemiskinan rumah tangga pesisir dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berupa rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya aksesibilitas dan penggunaan teknologi yang modern, serta kekurangan modal. Hal ini turut berimbas pada tingginya ketergantungan pada laut dan kurangnya kegiatan ekonomi alternatif.

Faktor eksternal turut mempengaruhi kemiskinan masyarakat pesisir yang identik sebagai nelayan tradisional. Kemiskinan nelayan tradisional dari faktor eksternal terutama disebabkan oleh fluktuasi musim-musim ikan dan kondisi alam untuk melakukan penangkapan. Kondisi infrastruktur pelabuhan perikanan dan hubungan *patron-client* nelayan dengan tengkulak dan pemilik kapal turut andil dalam menjelaskan kemiskinan pesisir. Bahkan modernisasi perikanan atau Revolusi Biru dinilai berdampak negatif karena mendorong terjadinya pengurasan sumber

daya laut secara berlebihan (*overfishing*). Faktor-faktor ini menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan dan produksi perikanan.

Analisis ini sejalan dengan Kusnadi (2003:19) yang menegaskan bahwa secara lebih komprehensif faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir. Ia membedakan faktor penentu kemiskinan masyarakat pesisir dalam dua kelompok. Pertama, sebab-sebab kemiskinan nelayan yang bersifat internal, mencakup: (i) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; (ii) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (iii) hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh; (iv) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (v) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan (vi) gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Kedua, sebab-sebab kemiskinan yang bersifat eksternal, mencakup: (i) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; (ii) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (iii) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (iv) penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan; (v) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan; (vi) terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen; (vii) terbatasnya peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa nelayan; (viii) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (ix) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Pentingnya pengaruh lokasi geografis telah dipertimbangkan pada penelitian terdahulu untuk meneliti pengaruhnya terhadap kemiskinan. Perbedaannya adalah pada disgregasi lokasi geografis yang digunakan. Studi Usman, et.al. (2006; 13) dengan menggunakan regresi logistik pada studi kemiskinan tahun 1999 dan 2002 menggunakan variabel karakteristik wilayah dari segi topografi yang dibedakan menjadi daerah pantai, daerah dataran, dan daerah pegunungan. Arah estimasi parameter dummy variabel pantai dan dataran ternyata negatif pada tahun 1999 maupun 2002. Dari signifikansinya daerah pantai sangat nyata, sedangkan daerah dataran di tahun 1999 tidak nyata tetapi di tahun 2002 sangat nyata pada taraf 5 persen. Daerah pegunungan ternyata memiliki resiko kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah pantai dan dataran. Hal ini dapat dilihat dari nilai Odds Ratio yang kurang dari satu yaitu masing-masing di tahun 1999 adalah 0,86 dan 0,98, sedangkan di tahun 2002 masing-masing adalah 0,73 dan 0,92. Daerah pantai ternyata memiliki resiko kemiskinan relatif paling rendah dibandingkan daerah dataran, ini terlihat dari nilai Marginal Effect yang relatif lebih besar pengurangannya.

Studi terdahulu yang cukup penting dengan mempertimbangkan lokasi geografis dilakukan oleh Bank Dunia (2007; 62-63) yang menggarisbawahi bahwa lokasi geografis berpengaruh terhadap kemiskinan karena adanya ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Bank Dunia memilih untuk memfokuskan pada perbedaan-perbedaan geografis dan temuan-temuan di enam wilayah pengelompokan kepulauan yang luas yaitu Sumatera, Jawa/Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara/Maluku and Papua. Hasil studi Bank Dunia menegaskan bahwa kemiskinan di pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Hal ini sejalan dengan yang

dilakukan Amar (2002) yang mengkaji kemiskinan di pedesaan Sumatera Barat dengan mempertimbangkan adanya pekerjaan alternatif dan luas lahan. Ciri agraris pedesaan ini identik dengan kemiskinan masyarakat pesisir yang juga agraris dengan ketergantungan ekonomi rumah tangga kepada alam yaitu laut dan pantai yang realtif tinggi.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya aspek kewilayahan dan lokasi geografis yang menjadi unik pada setiap pulau, provinsi, kabupaten, hingga desa atau kelurahan pada wilayah yang sama. Hasil yang ada mengungkapkan bahwa diagregasi lokasi geografis menjadi bersifat lokalistik.

Penelitian ini mengimplikasikan perlunya kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat mempertimbangkan aspek kewilayahan dengan lebih memprioritaskan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga di daerah pesisir. Kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir memiliki dimensi luas. Kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir perlu dilandaskan pada keswadayaan dengan meningkatkan modal manusia masyarakat pesisir. Kebijakan yang dilakukan yaitu memperluas layanan pendidikan dan kesehatan serta pendampingan masyarakat pesisir untuk membentuk karakter dan sikap mentalnya. Kemiskinan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan faktor sumberdaya alam. Untuk itu diperlukan pula kebijakan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan memulihkan kerusakan sumberdaya alam.

Kemiskinan masyarakat pesisir juga bersifat struktural. Sejumlah daerah di Sumatera Barat merupakan daerah pesisir karena itu penting untuk menyeimbangkan orientasi pembangunan ke arah pembangunan kelautan dan perikanan. Tak dapat diabaikan yaitu pada upaya untuk menciptakan dukungan kelembagaan berupa

kebijakan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur ekonomi berupa pelabuhan perikanan, informasi, kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan yang berpihak bagi pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Disamping kelembagaan masyarakat pesisir dalam memperkuat *collective action* melalui peran kelompok nelayan. Peran penguatan kelembagaan masyarakat nelayan dapat dilakukan pula melalui pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama Dinas kelautan dan Perikanan dan Dinas Sosial dan Tenaga kerja, maupun oleh perusahaan sebagai bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*), serta pemberdayaan dan advokasi oleh lembaga swadaya masyarakat.

b. Pengaruh Beban Ketergantungan Terhadap Kemiskinan

Beban ketergantungan yang tinggi, terutama anak-anak memberikan pengaruh terhadap probabilitas kemiskinan rumah tangga. Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan beban ketergantungan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan risiko rumah tangga menjadi miskin sebesar 1,04 kali dari setiap 1 unit penambahan beban ketergantungan.

Hasil ini sejalan dengan teori, bahwa beban ketergantungan yang tinggi, terutama rasio jumlah penduduk usia kurang dari 10 tahun terhadap jumlah penduduk berarti memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengkonsumsi daripada menghasilkan (produktif). Akibatnya, pendapatan rumah tangga secara per kapita menjadi rendah sehingga tergolong menjadi rumah tangga miskin. Besarnya beban ketergantungan rumah tangga menjadikan tingkat rumah tangga menjadi tinggi. Konsekuensinya, tingkat ditabungan dan investasi ekonomi rumah tangga untuk meningkatkan pendapatannya menjadi rendah.

Hasil penelitian oleh Bank Dunia (2007) sejalan dengan penelitian ini. Profil rumahtangga di Indonesia dinyatakan bahwa dari 100 orang Indonesia sebanyak 29 orang diantaranya atau 29 persen memiliki anggota keluarga lebih dari lima orang. Namun dari setiap 100 orang miskin di Indonesia, sebanyak 40 orang memiliki anggota rumahtangga lebih dari lima orang. Studi Usman et.al (2006: 9) mengungkapkan hasil serupa. Dengan indikator jumlah anggota rumahtangga, diperoleh nilai odds rasionya lebih besar mencapai 1,9 yang mengungkapkan bahwa setiap penambahan 1 anggota keluarga menyebabkan kecenderungan menjadi rumahtangga miskin meningkat sebesar 1,9 kali. Angka odds ratio yang lebih besar dibanding riset ini yang mencatat nilai odds rasio sebesar 1,08 dapat disebabkan karena dengan indikator yang digunakan Usman et.al. (2006) cenderung merupakan penduduk tidak produktif, baik anak-anak maupun penduduk usia lanjut.

Hasil penelitian ini sesuai pula dengan studi Anggraeni (2009;48) yang menemukan bahwa apabila rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga lebih dari lima atau sama dengan lima orang, maka kemungkinan rumah tangga menjadi miskin sebesar 12,72 persen. Dari hasil ini, digarisbawahi bahwa dengan indikator jumlah anggota rumahtangga, kadangkala juga berperan dalam menopang kehidupan rumah tangga tersebut dengan ikut membantu bekerja. Dalam konteks inilah, indikator beban ketergantungan pada penelitian ini dinilai lebih tepat.

Temuan penelitian ini berimplikasi pada revitalisasi program keluarga berencana yang sinergis dengan kebijakan ekonomi dan penyediaan akses pada pelayanan publik bagi rumahtangga miskin. Program Progressa di Meksiko merupakan contoh keberhasilan dalam memadukan antara kebijakan kependudukan

dan layanan publik pada pendidikan dan kesehatan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

c. Pengaruh Gender Kepala Rumahtangga Terhadap Kemiskinan

Pengaruh gender kepala rumahtangga didasarkan atas teori dan temuan empiris bahwa ciri umum kemiskinan yaitu lebih banyak dialami oleh perempuan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepala rumahtangga perempuan memiliki kecenderungan 1,02 bagi rumahtangga tersebut tergolong miskin dibandingkan kepala rumahtangganya adalah laki-laki. Namun variabel ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Keyakinan umum tentang rumahtangga yang dikepalai perempuan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi lebih miskin didasarkan oleh beberapa alasan : (i) secara ekonomi, kepala rumahtangga perempuan cenderung sebagai sumber nafkah tunggal bagi rumahtangga yang membentuk rendahnya pendapatan rumahtangga; (ii) secara sosial dan kultural, partisipasi dan kontribusi perempuan relatif rendah dalam aksesibilitas sosial dan pengakuan perannya secara kultural karena kondisi sosial-budaya yang patriakat mempersulitnya untuk meningkatkan taraf hidup rumahtangga; (iii) secara psikologis, rumahtangga perempuan cenderung terjadi karena perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Kondisi ini menyulitkan secara psikologis bagi perempuan; (iv) secara struktural, kepala rumahtangga perempuan memiliki keterbatasan dalam akses pekerjaan pada pendidikan formal sehingga masuk pada sektor informal dengan upah rendah atau sebagai buruh tidak terdidik dengan upah yang lebih rendah daripada buruh laki-laki.

Disamping itu, keterbatasan akses pada lembaga keuangan mempersulit untuk meningkatkan investasi.

Hasil penelitian yang mengungkapkan tidak signifikkannya pengaruh gender kepala rumahtangga terhadap kemiskinan dapat dijelaskan sebagaimana argumen Anggraeni (2009) yang menemukan hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Ia berpendapat bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tidak terbukti memiliki resiko untuk lebih miskin jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. Alasan ini dapat disebabkan oleh relatif terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan dan tingginya partisipasi perempuan pada pasar kerja. Kondisi sebagai kepala rumahtangga telah mendorong bahkan memaksa perempuan untuk masuk ke pasar kerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya.

Hasil penelitian ini serupa pula dengan yang temuan studi Bank Dunia (2007). Dengan menggunakan data Susenas 2004 ditemukan bahwa rumah tangga dengan kepala rumahtangga perempuan tampaknya sedikit memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin laki-laki. Hasil inilah yang dikonfirmasi dengan riset ADB (2000 dalam Bank Dunia, 2007; 51) yang melakukan kontrol terhadap ciri-ciri yang lain, seperti komposisi penduduk, pendidikan, sektor pekerjaan dan akses infrastruktur dasar, maka ceritanya berbeda: keluarga dengan kepala keluarga laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumahtangga dengan kepala rumahtangga perempuan.

Dalam konteks Sumatera Barat dengan sistem matrilineal, perempuan merupakan penerima waris. Pihak perempuan, apalagi jika menjadi kepala rumahtangga perempuan atau orangtua tunggal, maka rumahtangga tersebut

memperoleh dukungan dari sistem sosial Minangkabau dengan adanya bantuan ekonomi dari keluarga inti maupun keluarga besarnya serta masyarakat sekitarnya dalam pemenuhan kebutuhan anggota rumahtangga termasuk anak-anaknya oleh *mamak* (saudara kandung laki-laki dari ibu) atau *kemenakannya* (anak dari saudara ibu).

Implikasinya bagi kebijakan adalah pentingnya melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, terutama dari rumahtangga miskin dan perempuan yang menjadi kepala rumahtangga. Pemberdayaan ekonomi perempuan rumahtangga dan pekerja ini memiliki implikasi ekonomi yang luas bagi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan kualitas kesehatan dan gizi anak yang lebih baik. Program kredit mikro bergulir yang diinisiasi oleh Muhammad Yunus melalui *Grameen Bank* telah mendorong peningkatan upaya pemberdayaan ekonomi bagi kelompok usaha perempuan. Upaya-upaya semacam ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan dengan memberikan perhatian serius oleh instansi pemerintah, baik Dinas Koperasi dan UMKM maupun oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan pada setiap daerah.

d. Pengaruh Mata Pencaharian Pertanian Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan yang dialami oleh kepala rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian merupakan karakteristik kemiskinan yang menjadi variabel pada penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa kepala rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian memiliki probabilitas lebih kecil yaitu 0,64 kali tergolong sebagai rumahtangga miskin dibandingkan rumahtangga non-pertanian. Dengan kata lain, kepala rumahatngga rumahtangga dengan pekerjaan utam non-pertanian memiliki

peluang 1,56 kali untuk menjadi miskin daripada kepala rumahtangga yang bekerja di pertanian.

Hasil ini secara jelas menunjukkan hasil yang berbeda dari karakteristik umum yang dimiliki. Hasil ini dapat dijelaskan karena penelitian ini tidak mempertimbangkan apakah kepala rumahtangga dalam status bekerja atau sedang menganggur, sehingga lebih besarnya kemiskinan rumahtangga non-pertanian disebabkan oleh kepala rumahtangga yang menganggur digolongkan sebagai rumahtangga non-pertanian.

Hasil ini penelitian ini juga mengkonfirmasi kekhawatiran terjadinya peralihan kemiskinan pedesaan yang biasanya bekerja di sektor pertanian ke kemiskinan perkotaan yang bekerja di sektor informal maupun bekerja pada sektor industri maupun jasa berupah rendah. Argumen Bank Dunia (2007; 48-49) dapat menjelaskan temuan ini. Selama sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Pada tahun 1976, jumlah rumah tangga miskin yang tinggal di daerah perkotaan hanya 18,5 persen, tetapi pada tahun 2004 jumlahnya mencapai 32 persen, dan akan terus meningkat. Pada tahun 2015 mendatang, jumlah rumah tangga miskin di daerah perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 45 persen dan pada tahun 2023 jumlahnya akan melebihi angka 50 persen.

Kemiskinan di perkotaan lebih dicirikan oleh informalitasnya. Rumahtangga miskin non-pertanian yang identik dengan rumahtangga miskin perkotaan memiliki pekerjaan yang bervariasi dan biasanya menempati pemukiman padat dan kumuh, pedagang kaki lima, anak jalanan, pekerja informal seperti perbengkelan dan pemulung.

Hasil penelitian ini tidak serta merta mengurangi perhatian terhadap kemiskinan pedesaan maupun pertanian. Dengan konteks Sumatera Barat dengan budaya merantau dan berdagangnya, menjadikan daerah pedesaan kekurangan tenaga kerja untuk menggarap lahan pertanian. Petani di Sumatera Barat bekerja pada pertanian formal. Bank Dunia (2007) mengingatkan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan pekerjaan di sektor informal. Pasar tenaga kerja dicirikan oleh tingginya sektor informal. Pada tahun 2004, 51,6 persen kepala rumah tangga bekerja di sektor informal (terjadi kenaikan sebesar 47,5 persen pada 1996). kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian informal memiliki kemungkinan 2,1 kali lebih tinggi menjadi miskin, mereka yang bekerja di sektor jasa informal 21 persen lebih rendah kemungkinannya menjadi miskin dibandingkan pekerja di sektor lainnya.

Cakupan, sifat dan ciri-ciri kemiskinan pedesaan dan pertanian maupun wilayah perkotaan, serta proses yang kompleks tentang peralihan kemiskinan pertanian ke non-pertanian maupun berkembang cepatnya sektor informal baik di desa terutama di perkotaan karena urbanisasi, sangat penting dipahami para pembuat kebijakan pada tahun-tahun mendatang.

Implikasi penting dari penelitian ini yaitu pentingnya memperhatikan pengentasan kemiskinan melalui perhatian, penataan dan pengelolaan sektor informal, baik di perkotaan maupun pedesaan diantaranya dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Perhatian ini dalam bentuk penguatan kelembagaan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, akses pasar dan permodalan, serta perubahan paradigma kebijakan untuk mengelola sektor informal daripada bersikap menentang.

c. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pendidikan kepala rumah tangga memiliki nilai koefisien yang negatif dengan nilai rasio odds kurang dari satu. Nilai odds ratio sebesar 0,849 menyatakan bahwa setiap bertambahnya satu tahun bersekolah kepala rumahtangga maka peluang responden menjadi rumahtangga miskin menurun sebesar 0,85 kali. Artinya penambahan pendidikan kepala rumahtangga memperkecil kecenderungan bagi rumahtangga tersebut menjadi rumahtangga miskin.

Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) menyatakan bahwa Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kebijakan wajib belajar 9 tahun hendaknya ditingkatkan menjadi 12 tahun, sehingga semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah. (Prasetyo: 2010). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), dimana menggunakan jumlah lulusan SMP, jumlah lulusan

SMA dan jumlah lulusan diploma sebagai ukuran pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009), yang menggunakan angka melek huruf sebagai ukuran pendidikan serta penelitian Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005) yang menunjukkan investasi pendidikan mampu menurunkan kemiskinan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Penelitian Rasidin K dan Bonar M (2004) diketahui dari hasil regresi bahwa pendidikan yang diukur menggunakan jumlah lulusan SMA keatas kabupaten/kota di Jawa Tengah memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dengan koefisien sebesar - 0,0000109. Kenaikan pendidikan sebesar 1000 jiwa akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0000109 persen. Hal ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan

keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Rata-rata capaian jenjang pendidikan antarwilayah tidak begitu besar (dengan perbedaan antara yang tertinggi dan terendah hanya terpaut 0,6 tahun). Namun perbedaan capaian jenjang pendidikan di kalangan penduduk miskin lebih besar.

Penelitian tentang pendidikan sama halnya dengan temuan di negara-negara lain, capaian jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi pula. Selain itu, koefisien korelasi parsial pada umumnya lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan, baik bagi kepala rumah tangga maupun anggota keluarga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di daerah perkotaan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga di daerah pedesaan untuk setiap tambahan tahun pendidikan.

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Usman et.al. (2006) yaitu tingkat pendidikan karena ini akan menjadi modal sumber daya manusia. Variabel yang mewakili tingkat pendidikan adalah jumlah tahun bersekolah dari seluruh anggota keluarga dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga. Nilai estimasi parameter kedua variabel ini seperti disebutkan di atas sangat nyata dengan arah atau tanda yang negatif, artinya pendidikan memegang peranan penting dalam keluarga agar bisa keluar dari kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan kepala keluarga dan atau semakin tinggi rata-rata pendidikan seluruh anggota rumah tangga semakin kecil peluang rumah tangga tersebut untuk masuk menjadi kategori miskin.

Temuan ini berimplikasi pada upaya untuk meningkatkan penyediaan layanan pendidikan dan keterampilan termasuk bagi penduduk dewasa dari rumah tangga miskin. Layanan pendidikan dan ketrampilan ini dapat berupa Kejar Paket A bagi kepala rumah tangga miskin yang masih buta huruf, kegiatan penyuluhan pertanian atau peningkatan keterampilan usaha.

Pada saat bersamaan, anak-anak dari rumah tangga harus memperoleh perhatian agar sekurangnya mampu menamatkan pendidikan dasar. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya pewarisan kemiskinan dan memutus rantai setan kemiskinan. Kebijakan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah berupa bantuan transportasi bagi siswa miskin, beasiswa, bahkan perluasan inisiatif Program Keluarga Harapan Generasi berupa pemberian bantuan bersyarat tunai bagi rumah tangga miskin yang dikaitkan dengan pendidikan dan kesehatan anaknya yang dilakukan oleh setiap daerah.

d. Pengaruh Keluhan Kesakitan Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keluhan kesehatan yang dialami kepala rumah tangga memiliki peluang 1,025 kali lebih besar dibandingkan kepala rumah tangga yang tidak mengalami keluhan kesehatan. Namun, hasil uji parsialnya menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini tidak signifikan terhadap probabilitas rumah tangga tersebut menjadi miskin.

Dengan rendahnya tingkat kesehatan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga, berarti banyaknya jumlah yang hilang untuk mencari nafkah keluarga cenderung berkurang. Dengan banyaknya waktu yang hilang produktivitas rumah tangga akan menjadi rendah dan akhirnya pendapatan rumah tangga juga akan menjadi kecil. Selanjutnya dengan rendahnya tingkat kesehatan berakibat kecilnya peluang-peluang

ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh kepala rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Di sisi lain cukup banyak peluang-peluang ekonomi di luar pertanian yang dapat dilakukan, tetapi dengan rendahnya tingkat kesehatan, berarti peluang ekonomi tersebut tidak dapat mereka manfaatkan. melilit masyarakat Sumatera Barat diduga berasal dari: (a) kapasitas wilayah yang rendah sebagaimana ditunjukkan oleh sumberdaya alam yang rendah, teknologi yang rendah dan kelembagaan yang masih belum berfungsi, (b) sumberdaya manusia yang rendah sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, aksesibilitas terhadap kelembagaan yang rendah dan kurangnya mata pencaharian alternatif, di samping faktor geografis dan sistem nilai budaya yang melekat dalam

Tidak signifikannya hasil penelitian ini dapat disebabkan karena indikator yang tersedia pada Susenas. Kondisi kesehatan kepala rumah tangga hanya dilihat selama satu bulan terakhir saat survei yang tidak mencerminkan sepenuhnya kondisi kesehatan dan pengaruhnya terhadap produktivitas, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan rumahtangga. Hasilnya mungkin akan sedikit berbeda jika yang diperoleh data tentang keluhan kesakitan dalam satu tahun terakhir. Terlebih bila tersaji data tentang jumlah hari sakit yang tidak memungkinkan bagi rumahtangga untuk bekerja.

Sebagaimana temuan Amar (2002) dengan menggunakan indikator kesehatan yaitu kepala rumah tangga yang pernah mengalami sakit dan meninggalkan pekerjaan dalam satu tahun terakhir (KS1), diperoleh hasil sangat signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Probabilitas rumah tangga tersebut berada dalam

kemiskinan sebesar 2,41 kali jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak pernah mengalami sakit (KS 0), *ceteris paribus*.

Implikasi kebijakan bagi pemerintah yaitu peningkatan sistem pelayanan kesehatan daerah yang meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan, kecukupan kuantitas dan kualitas tenaga medis, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin berupa sistem jaminan kesehatan, serta upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat sebagai tindakan pencegahan dari penyakit-penyakit mewabah, maupun kebijakan-kebijakan kesehatan lainnya yang berpihak bagi masyarakat miskin.

e. Pengaruh Listrik Terhadap Kemiskinan

Ketersediaan infrastruktur dasar diantaranya listrik sangat menentukan bagi aktivitas ekonomi rumah tangga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketiadaan listrik memberikan pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap kecenderungan rumah tangga tersebut miskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang sumber penerangannya non-listrik memiliki peluang 2,3 kali menjadi rumah tangga miskin dibandingkan rumah tangga yang sumber penerangannya dari listrik.

Bank Dunia (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial

kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri.

Kemiskinan merupakan persoalan mikro, Tim LPEM-PSEKP-PSP (2004) menyebutkan bahwa salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang cukup efektif adalah pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah akses pada listrik. Akses pada listrik semakin penting mengingat dampak positif sosial ekonomi. Listrik dapat menciptakan efisiensi, dari penelitian yang pernah dilakukan LPEM diketahui bahwa peningkatan akses listrik kepada keluarga miskin akan mengurangi biaya energi hingga 4 kali lipat yang memungkinkan keluarga miskin dapat menggunakan tabungan ini untuk belanja rumah tangga lainnya seperti untuk memperbaiki status gizi rumah tangga atau pendidikan.

Implikasi kebijakan yang penting adalah pemerintah daerah perlu mendorong upaya upaya pencapaian elektrifikasi pada seluruh rumahtangga, terutama rumahtangga miskin. Skala efisiensi yang belum tercapai pada daerah-daerah terpencil maupun jumlah rumahtangga yang sedikit pada suatu wilayah dapat diatasi dengan pembangunan pembangkit listrik skala kecil dan sumber energi alternatif sesuai dengan kondisi daerah seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik mikrohidro.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan dan menjawab rumusan masalah, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kesesuaian dan kecocokan model yang menunjukkan adanya pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap kecenderungan rumahtangga untuk menjadi miskin atau tidak miskin, pengujian secara parsial pada variabel rumahtangga yang berlokasi di daerah pesisir ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan atau peluang rumahtangga tersebut tergolong miskin. Peluang rumahtangga berlokasi di pesisir 1,9 kali lebih besar dibandingkan rumahtangga yang berlokasi di daerah bukan pesisir.
- b. Beban ketergantungan yang tinggi, yaitu jumlah anak-anak berusia kurang dari 10 tahun (beban ketergantungan muda) pengaruh terhadap probabilitas kemiskinan rumahtangga. Peningkatan 1 unit penambahan beban ketergantungan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan risiko rumahtangga untuk menjadi miskin sebesar 1,04 kali.
- c. Rumahtangga dengan kepala rumahtangga adalah perempuan memiliki kecenderungan 1,02 bagi rumahtangga tersebut tergolong miskin dibandingkan kepala rumahtangganya adalah laki-laki. Namun variabel ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hasil ini disebabkan oleh banyak perempuan yang terlibat dalam pasar kerja.

- d. Kepala rumahtangga yang bekerja di sektor pertanian memiliki probabilitas lebih kecil yaitu 0,64 kali tergolong sebagai rumahtangga miskin dibandingkan rumahtangga non-pertanian. Dengan kata lain, kepala rumahatngga dengan pekerjaan utam non-pertanian memiliki peluang 1,56 kali untuk menjadi miskin daripada kepala rumahtangga yang bekerja di pertanian.
- e. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pendidikan kepala rumah tangga memiliki nilai koefisien yang negatif dengan nilai rasio odds kurang dari satu. Nilai odds ratio sebesar 0,849 menyatakan bahwa setiap bertambahnya satu tahun bersekolah kepala rumahtangga maka peluang responden menjadi rumahtangga miskin menurun sebesar 0,85 kali. Artinya pertambahan pendidikan kepala rumahtangga memperkecil kecenderungan bagi rumahtangga tersebut menjadi rumahtangga miskin.
- f. Keluhan kesehatan yang dialami oleh kepala rumahtangga memiliki peluang 1,025 kali lebih besar bagi rumahtangga tersebut untuk menjadi miskin dibandingkan kepala rumahtangga yang tidak mengalami keluhan kesehatan.
- g. Ketiadaan penggunaan fasilitas listrik memberikan pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap kecenderungan rumahtangga tersebut miskin. Akses terhadap listrik ternyata dapat menentukan resiko kemiskinan bahwa rumahtangga yang sumber penerangannya non-listrik memiliki peluang 2,3 kali menjadi rumah tangga miskin dibandingkan rumah tangga yang sumber penerangannya dari listrik.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penelitian ini mengajukan sejumlah saran kebijakan, sebagai berikut :

- a. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat mempertimbangkan aspek kewilayahan dengan lebih memprioritaskan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan rumahtangga di daerah pesisir dari berbagai bidang secara terpadu. Instansi pemerintah terkait, dinataranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, sesuai dengan nomenklatur struktur oragnisasi setiap pemerintah daerah, perlu memperluas layanan publik diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pelestarian lingkungan pesisir, aksesibilitas bantuan dan kredit.
- b. Pengaruh positif dan signifikan beban ketergantungan terhadap peluang menjadi miskin memiliki implikasi kebijakan bagi revitalisasi program keluarga berencana. Program Keluarga Berencana ditujukan dan dipadukan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana Program Progressa di Meksiko. Kebijakan ini dapat dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan, BKKBN Propinsi Sumatera Barat, maupun pihak terkait lainnya.
- c. Pengaruh kepala rumahtangga perempuan terhadap peluang rumahtangga tergolong miskin, meskipun tidak berpengaruh signifikan, tetap perlu memperoleh perhatian. Kebijakan yang dilakukan yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan usaha mikro, kecil, dan menengah terutama dari rumahtangga miskin dan perempuan yang menjadi kepala

rumahtangga. Pemberdayaan ekonomi perempuan ini dapat dilakukan sebagaimana program Grameen Bank dengan pendamping kelompok usaha perempuan, termasuk akses pada program kredit mikro bergulir. Upaya-upaya semacam ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan dengan memberikan perhatian serius oleh instansi pemerintah, baik Dinas Koperasi dan UMKM maupun oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan pada setiap daerah.

- d. Ditemukannya hasil yang berbeda dari keyakinan umum bahwa kepala rumahtangga pertanian cenderung meningkatkan probabilitas menjadi rumahtangga miskin mengungkapkan bahwa mungkin disebabkan terjadinya peralihan kemiskinan pertanian pedesaan kepada kemiskinan sektor informal di perkotaan. Untuk itu, diperlukan perhatian, penataan dan pengelolaan sektor informal, baik di perkotaan maupun pedesaan diantaranya dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Perhatian ini dalam bentuk penguatan kelembagaan, peningkatan pendidikan dan keterampilan, akses pasar dan permodalan, serta perubahan paradigma kebijakan untuk mengelola sektor informal daripada bersikap menentangnya.
- e. Pengaruh yang signifikan dari lama bersekolah kepala rumahtangga terhadap peluang rumahtangga menjadi miskin menghendaki peningkatan penyediaan layanan pendidikan dan keterampilan bagi kepala rumahtangga dari rumahtangga miskin. Layanan pendidikan dan keterampilan ini dapat berupa Kejar Paket A bagi kepala rumahtangga miskin yang masih buta huruf, kegiatan penyuluhan pertanian atau peningkatan keterampilan usaha. Pada saat bersamaan, pendidikan anak-anak dari rumahtangga harus memperoleh

perhatian kebijakan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah seperti bantuan transportasi bagi siswa miskin, beasiswa, bahkan perluasan inisiatif bantuan langsung bersyarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh setiap daerah.

- f. Adanya pengaruh positif meskipun tidak signifikan pada variabel keluhan kesehatan kepala rumah tangga terhadap peningkatan peluang kemiskinan rumah tangga mengimplikasikan kebijakan pemerintah untuk peningkatan sistem pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini diantaranya ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan terutama di daerah konsentrasi penduduk miskin, kecukupan kuantitas dan kualitas tenaga medis, penyediaan sistem jaminan kesehatan, serta upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat bagi wilayah yang menjadi konsentrasi penduduk miskin dan endemik penyakit mewabah.
- g. Implikasi kebijakan yang penting adalah pemerintah daerah perlu mendorong upaya pencapaian elektrifikasi pada seluruh rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Skala efisiensi yang belum tercapai pada daerah-daerah terpencil maupun jumlah rumah tangga yang sedikit pada suatu wilayah dapat diatasi dengan pembangunan pembangkit listrik skala kecil dan sumber energi alternatif sesuai dengan kondisi daerah seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik mikrohidro.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Sumatera Barat 2006 – 2010*. Sumatera Barat.
- , *Statistik PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat 2006 – 2010*. Sumatera Barat.
- , *Statistik Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kabupaten di Sumatera Barat 2006 – 2010*. Sumatera Barat.
- Bank Dunia. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: World Bank
- Booth, Anne dan Firdausy. 1996. *The Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families*. New York : Economic and Social Commission for Asia and Pacific.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Danim, Prof. Dr. Sudarwan. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghaiha, Ragghav. 1985. Poverty Technology and Infrastructure in Rural India. *Cambridge Journal of Economics*. Volume 9.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2004 . *Basic Econometric* , Mc Graw Hill Press Ltd. Singapura
- Hagul, Peter. 1986. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta : Yayasan Dian Desa.
- Haugton, Jonathan dan Kahandker, Shahidur R. 2012. *Handbook on Poverty + Inequality*. New York : World Bank.

- Hosmer, David W dan Satnley Lemeshow.1989. *Applied Logistic Regression*. New York : Awley Interscience Publication.
- Ilave, Hulamari and Elizabeth. 1994. *Planet Rural Development Bias or Institutional Gender Bias? : Resettlement Schemed and Woman in Papua New Guinea*. Kuala Lumpur : Asian and Pacific Development Center.
- Jhingan. M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakrta : PT Raja Grafindo Persada.
- Meier, Gerald dan James E. Rauch. 2000. *Leading Issues in Economic Development*. Seventh Edition. New York : Oxford University Press.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Adit Agus. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Skripsi. Semarang: UNDIP
- Salim, Emil. 1984. *Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta : Idayu Press.
- Schubert, Renate. 1994. Poverty in Developing Countries : Its Definition, Extent, and Implication. *Economic A Binnual Collection of Recent German Studies*. Vol 49/50
- Siregar. Hermanto, Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses tanggal 29 Oktober 2009.
- Sitepu, Rasidin K. Bonar M. Sinaga, 2004. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium.<http://ejournal.unud.ac.id/>

[?module=detailpenelitian&idf=7&idj=48&idv=181&idi=](#) 48&idr=191.

Diakses tanggal 29 Oktober 2009.

Suryawati, Criswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.

http://www.jmpkonline.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdfDiakses

tanggal 11 November 2009.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2011. *Indikator*

Kesejahteraan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jakarta: TNP2K

Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2007. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*

Ketiga. Edisi Kesembilan, terjemahan. Penerbit Erlangga.

Wongdesmiwati, 2009. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di

Indonesia: Analisis Ekonometrika. [http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi)

[2009/10/pertumbuhan-ekonomi](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi) dan pengentasan- Kemiskinan-di-indonesia-

[_analisis-ekonometri_.pdf](#). Diakses tanggal 7 Desember 2009.